

**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

MEMORANDUM
NOMOR 2516/PSDKP.2/TU.140/X/2023

Yth. : Direktur Jenderal PSDKP
Dari : Plh. Direktur Pemantauan dan Operasi Armada
Hal : Laporan Kinerja Periode Triwulan III 2023 Direktorat POA
Lampiran : 1 (satu) berkas
Tanggal : 13 Oktober 2023

Sehubungan dengan telah dilakukan pengukuran kinerja pada Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada sebagai salah satu upaya implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah lingkup Ditjen PSDKP, bersama ini kami sampaikan Laporan Kinerja Triwulan III 2023 Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada

Demikian kami sampaikan, atas perkenan dan arahan Bapak Direktur Jenderal kami ucapkan terima kasih.



Ditandatangani
secara elektronik

Saiful Umam

Tembusan:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal PSDKP
2. Direktur Pemantauan dan Operasi Armada



LAPORAN KINERJA DIREKTORAT POA

Triwulan III Tahun 2023



Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada
Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya
Kelautan dan Perikanan
Tahun 2023



Kata Pengantar



Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada Triwulan III Tahun 2023 disusun dalam rangka memenuhi amanah Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Laporan ini sebagai bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas atas pencapaian Kinerja Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada Tahun 2023.

LKj berfungsi sebagai alat penilaian kinerja secara kuantitatif, alat kendali serta pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada. Sejalan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi, Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada telah menerapkan metode Balanced Scorecard (BSC) sebagai alat

manajemen kinerja. Melalui implementasi BSC, pencapaian Sasaran Strategis Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja sebagaimana telah ditetapkan pada Kontrak Kinerja Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada pada Tahun 2023.

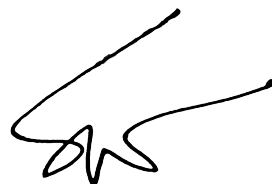
Pencapaian IKU Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada Tahun 2023 telah diupayakan melalui pelaksanaan program Pemantauan dan Operasi Armada dengan 4 (empat) output/kegiatan utama, yaitu : (1) Pengembangan Infrastruktur Pengawasan SDKP; (2) Operasional Pusat Pengendalian; (3) Penyediaan Logistik dan Pengawasan Kapal Pengawas; dan (4) Operasional Armada dan Perawatan. Sampai dengan Triwulan III 2023 kinerja Direktorat Pemantuan dan Operasi Armada telah berhasil melakukan beberapa kinerja strategis yang menjadi perhatian publik dalam hal operasi kapal pengawas, pengembangan teknologi, perbaikan pelayanan publik dan pengembangan infrastruktur pengawasan.

Akhir kata, semoga LKj ini dapat bermanfaat untuk perbaikan birokrasi dan sebagai bentuk pertanggung jawaban serta akuntabilitas Direktorat Pemantuan dan Operasi Armada pada Triwulan III Tahun 2023. Keberadaan laporan ini tidak hanya untuk

memenuhi kewajiban namun sebagai upaya perbaikan terus menerus di Direktorat Pemantuan dan Operasi Armada dengan melakukan evaluasi dan perbaikan kinerja untuk triwulan berikutnya dan dimasa mendatang agar menjadi lebih baik.

Jakarta, 13 Oktober 2023

Plh. Direktur Pemantuan dan Operasi Armada



Saiful Umam, S.St.Pi

Tim Penyusun

Penanggungjawab

Direktur Pemantauan dan Operasi Armada

Koordinator Pelaporan Direktorat POA

1. Aulia Riza Farhan, S.T., M.Sci.Tech., Ph.D
2. Ema Velayati, S.St.Pi
3. Husain, S.Kom

Kontributor Pelaporan Direktorat POA

1. Ikrom Bungsu, S.Pi
2. Widya Ayu Lestari, S.I.K
3. Ridwan Nurzaha, S.Si
4. Edwin Haryanto, S.tr.Pi
5. Bilmantasya Al Fattha,
6. Noval Reza Jaya, A.Md

Daftar Isi

Kata Pengantar	2
Tim Penyusun	4
Daftar Isi	5
Daftar Tabel.....	6
Daftar Gambar	7
Daftar Lampiran	8
Ringkasan Eksekutif	9
BAB I Pendahuluan.....	13
Latar Belakang.....	14
Maksud dan Tujuan	15
Tantangan dan Isu-Isu Strategis Tahun 2023	16
BAB II Perencanaan Kinerja.....	22
Arah Kebijakan KKP 2020-2024	23
Arah Kebijakan Ditjen PSDKP 2020-2024.....	25
Kegiatan Pemantauan dan Operasi Armada	28
Perjanjian Kinerja Dit. POA	29
Alokasi Anggaran	31
BAB III Akuntabilitas Kinerja	32
Pengukuran Capaian Kinerja	33
Evaluasi dan Analisis Pencapaian Kinerja.....	36
Realisasi Anggaran	70
BAB IV Penutup	72
Kesimpulan.....	73
Rekomendasi	73
Lampiran	74

Daftar Tabel

Tabel 1 Target dan realisasi capaian kinerja Dit. POA TW III 2023	10
Tabel 2 Capaian Kinerja Direktorat POA Triwulan III 2023	33
Tabel 3 Target dan Realisasi IKU-1 Triwulan III 2023	38
Tabel 4 Target dan Realisasi IKU-2 Triwulan III 2023	39
Tabel 5 Rincian komponen IKU 2.....	40
Tabel 6 Rincian analisis pelanggaran periode Januari sd Juni 2023	41
Tabel 7 Rincian capaian IKU 3 Direktorat POA Triwulan III 2023	43
Tabel 8 Rincian capaian IKU 4 Direktorat POA Triwulan III 2023	46
Tabel 9 Hasil Operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan.....	46
Tabel 10 Rincian capaian IKU 5 Direktorat POA Triwulan III 2023	49
Tabel 11 Target dan Realisasi IKU 6 Periode Triwulan III 2023	50
Tabel 12 Target dan Realisasi IKU 7 Periode Triwulan III 2023	53
Tabel 13 Hasil survey kepuasan masyarakat	53
Tabel 14 Hasil capaian kinerja IKU 8 periode triwulan III 2023.....	55
Tabel 15 Target dan Realisasi IKU 9 Periode Triwulan III 2023	56
Tabel 16 Target dan Realisasi IKU-10 Periode Triwulan III 2023	58
Tabel 17 Target dan Realisasi IKU-11 Periode Triwulan III 2023	59
Tabel 18 Target dan realisasi IKU 12 periode Triwulan III 2023	60
Tabel 19 Target dan realisasi IKU 13 periode Triwulan III 2023	61
Tabel 20 Rekapitulasi Capaian IKU Persentase Rekomendasi Hasil Triwulan III 2023	61
Tabel 21 Target dan realisasi IKU 14 periode Triwulan III 2023	62
Tabel 22 Rincian target dan realisasi IKU-15 periode Triwulan III 2023.....	63
Tabel 23 Target dan realisasi IKU-16 periode Triwulan III 2023	65
Tabel 24 Target dan realisasi IKU 17 periode Triwulan III 2023	67
Tabel 25 Target dan realisasi IKU 18 periode Triwulan III 2023	68
Tabel 26 Target dan realisasi IKU-19 periode Triwulan III 2023	69
Tabel 27 Rekap Realisasi Anggaran Satker Direktorat POA Triwulan III Tahun 2023 ..	70

Daftar Gambar

Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat POA	20
Gambar 2. Komponen penilaian indeks kualitas supervisi Pokmaswas	37

Daftar Lampiran

Lampiran 1 Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....	75
Lampiran 2 Rincian Hasil Operasi Pesawat Patroli.....	78
Lampiran 3 Daftar kegiatan pemeliharaan dan perawatan kapal pengawas	87

Ringkasan Eksekutif

Sebagai pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada (POA) telah menyusun Laporan Kinerja (LKj) periode triwulan III Tahun 2023. Laporan Kinerja tersebut merupakan perwujudan transparansi dan akuntabilitas Direktorat POA dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Peta Strategis Direktorat POA tahun 2023 dan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) tahun 2020-2024.

Sejalan dengan upaya pencapaian Visi dan Misi dimaksud. Direktorat POA telah menetapkan 5 Sasaran Kegiatan dan 19 Indikator Kinerja (IK) dengan target pencapaian IKU/IK periode Triwulan III 2023 sebanyak 10 IKU/IK telah memenuhi target. Capaian kinerja Direktorat POA untuk Triwulan III 2023 mencapai 110,86% mengalami penurunan sebesar 0,56% dari capaian triwulan III 2022 sebesar 111,42%.


Dalam hal pelaksanaan anggaran, Direktorat POA telah melaksanakan 9 Rincian Output (RO) yang tertuang dalam RKA-K/L Satker Sekretariat Ditjen PSDKP tahun 2023. Pagu Direktorat POA sebesar Rp 464.767.661.000 (empat ratus enam puluh empat miliar tujuh ratus enam puluh tujuh juta enam ratus enam puluh satu ribu rupiah). Realisasi anggaran Direktorat POA Triwulan III Tahun 2023 sebesar Rp 202.171.611.327 (dua ratus dua miliar seratus tujuh puluh satu juta enam ratus sebelas ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah) atau sebesar 43,50% dari Pagu anggaran. Realisasi anggaran tersebut lebih rendah dari periode Triwulan III 2022 (Rp 229.829.227.480), dipengaruhi adanya *Save Automatic Adjustment*, namun kinerja penyerapan anggaran tersebut tetap dimaksimalkan sebagai bentuk perbaikan tata Kelola pelaksanaan anggaran dengan percepatan pengadaan Barang dan Jasa serta pelaksanaan kegiatan lebih awal di Tahun 2023.

Dalam merealisasikan anggaran, Direktorat POA mengacu pada prinsip *budget follow program* secara efektif dan efisien. Artinya, setiap anggaran yang dikeluarkan harus mendukung pencapaian indikator kinerja lingkup Direktorat POA. Realisasi pencapaian indikator kinerja Direktorat POA periode triwulan III Tahun 2023, ditabulasikan pada Tabel 1 berikut

Tabel 1. Target dan realisasi capaian kinerja Dit. POA TW III 2023

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Capaian	%
01 Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat yang partisipatif	01 Indeks kualitas supervisi pembinaan Pokmaswas (Indeks)	40	61.58	155
02 Terselenggaranya sistem pemantauan SDKP yang akurat	02 Indeks Pemenuhan data dan analisis hasil pemantauan untuk operasi pengawasan SDKP (indeks)	60	75	120
03 Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif	03 Indeks Kinerja operasi pesawat patroli (indeks)	93	98.51	105.92
	04 Indeks Kinerja operasi kapal pengawas (indeks)	87.6	96.19	109.81
04 Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan	05 Persentase Penyelesaian pembangunan sarana Pengawasan SDKP Kapal Pengawas Kelas II (%)	100	-	-
	06 Persentase penyelesaian perawatan sarana Pengawasan SDKP (%)	100	100	100

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Capaian	%
05 Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP 	07 Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (Indeks)	80	97	117.94
	08 Persentase Penyelesaian rancangan NSPK bidang pengawasan SDKP lingkup Direktorat POA (%)	60	-	-
	09 Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Direktorat POA (%)	100	100	100
	10 Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat POA (Indeks)	78	-	-
	11 Tingkat pemahaman peserta Bimtek lingkup Direktorat POA (%)	77	-	-
	12 Nilai rekonsiliasi kinerja lingkup Direktorat POA (Nilai)	90	-	-

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Capaian	%
05 Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP 	13 Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Direktorat POA yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	75	100	133
	14 Persentase Realisasi Anggaran lingkup Direktorat POA (%)	99.4	-	-
	15 Nilai Implementasi Program Budaya Kerja (Nilai)	21	-	-
	16 Jumlah inovasi yang dihasilkan (inovasi)	1	-	-
	17 Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Direktorat POA (%)	92	-	-
	18 Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup Direktorat POA (%)	77.5	-	-
	19 Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup Direktorat POA (%)	77.5	-	-
Nilai Capaian Kinerja Direktorat POA				110.86

BAB I

Pendahuluan

Latar Belakang

Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan memiliki peran strategis dalam Pembangunan kelautan dan perikanan. Peran pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan untuk memastikan bahwa pelaku usaha mematuhi peraturan perundang-undangan dibidang kelautan dan perikanan. Pilar pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan semakin kuat, saat ini kewenangan yang dimiliki yaitu pemantauan dan pengawasan, penegakan hukum dan pemberian sanksi administrasi dibidang kelautan dan perikanan.

Salah satu kunci keberhasilan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan tersebut yaitu memerlukan peran dan kinerja dari unit kerja yaitu Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada (POA). Ruang lingkup tugas dari Direktorat POA meliputi penyediaan sarana dan prasarana pengawasan, penyiapan logistik dan operasi kapal pengawas, pengoperasian kapal pengawas dan pesawat patroli, pemantauan dan penyelenggaraan pusat pengendalian serta pemerliharaan dan perawatan kapal pengawas. Ukuran kinerja tersebut dengan jelas ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat POA.

Dalam rangka mewujudkan tugas dan fungsi Direktorat POA yang handal, profesional, akuntabel, efektif dan efisien, diperlukan manajemen kinerja yang meliputi: aspek perencanaan, pelaksanaan, pengukuran dan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan. Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada sebagai instansi pemerintah dan unsur penyelenggara Negara diwajibkan menetapkan target kinerja serta melakukan pengukuran kinerja. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Direktorat POA telah menyusun Laporan Kinerja (LKj) Direktorat POA yang menginformasikan capaian kinerja selama Triwulan III 2023. Keberadaan laporan Kinerja (LKj) ini diharapkan sebagai bahan evaluasi untuk memberikan umpan balik perbaikan dan sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik.

Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja Direktorat POA Triwulan III 2023 disusun dengan tujuan yaitu:

1

Laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana penyampaian pertanggungjawaban kinerja Direktorat POA kepada seluruh stakeholder.

2

Laporan akuntabilitas merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Direktorat POA sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang.

Tantangan dan Isu-Isu Strategis Tahun 2023

A. Tantangan Pengawasan SDKP

Tantangan pengawasan dan penegakan hukum dibidang kelautan dan perikanan dilaut saat ini semakin kompleks dan beraneka ragam jenisnya serta datangnya tidak dapat diprediksi, berdasarkan Resolusi Majelis Umum PBB Nomor: A/RES/63/111 yang dikeluarkan pada tanggal 5 Desember 2008, ada 5 (lima) ancaman keamanan di laut dan salah satunya yaitu kegiatan IUU fishing. Selama ini, Indonesia merupakan salah satu negara yang terpapar dari kegiatan IUUF, dibuktikan dengan jumlah kapal IUUF yang ditangkap oleh kapal pengawas KKP selama kurun waktu tahun 2007-2022 yaitu sebanyak 2112 kapal terdiri dari kapal ikan berbendera asing maupun berbendera Indonesia. IUU fishing merupakan kegiatan yang tersembunyi, multidimensi serta sulit untuk diprediksi, kegiatan penangkapan ikan bersifat lintas negara sehingga sulit untuk mengidentifikasi aktor yang membiayai maupun pemiliknya.

Semakin kompleksnya ancaman pelanggaran di laut dibidang kelautan dan perikanan tentunya memerlukan perubahan dalam pengawasan SDKP dengan mengandalkan teknologi informasi agar pengawasan lebih efektif dan efisien. Tuntutan penggunaan teknologi dalam pengawasan SDKP tidak bisa ditawar-tawar lagi, sudah sepatutnya kita menggunakan perkembangan teknologi komputasi digital, internet, cloud computing, *artificial intelligent* (AI), *big data* serta *Internet of Thing* (IoT). Modernisasi armada pengawasan juga menjadi kebutuhan, saat ini armada kapal pengawas 60% sudah berumur diatas 10 tahun dengan daya jelajah yang terbatas dan kemampuan serta kehandalan dalam melakukan pengawasan di laut juga sangat terbatas sehingga perlu untuk melakukan peremajaan kapal pengawas yang baru dan lebih modern. Modernisasi juga diperlukan untuk prasarana pengawasan dengan tuntutan pengawasan SDKP di UPT Pengawasan yang semakin kompleks maka keberadaan prasarana pengawasan menjadi kunci keberhasilan.

Kementerian kelautan dan Perikanan mulai tahun 2022 telah menetapkan kebijakan penangkapan ikan terukur, Kebijakan penangkapan ikan terukur merupakan reformasi pengelolaan perikanan berbasis *output control* (kuota per

kapal), dengan pembagian kuota untuk nelayan lokal, kuota bukan untuk tujuan komersial (diantaranya diklat, litbang, kesenangan dan wisata), serta kuota untuk industri, salah satu faktor kunci keberhasilan kebijakan tersebut memerlukan upaya pengawasan di laut (while fishing) untuk memastikan bahwa pelaku usaha kelautan dan perikanan mematuhi ketentuan perundang-undangan yang ditetapkan.

Perkembangan harga BBM dunia terus mengalami kenaikan, kondisi ini mengakibatkan hari operasi kapal pengawas terkoreksi dan menjadi berkurang dari yang direncanakan sehingga dengan kemampuan frekuensi operasi kapal pengawas tersebut maka pengawasan dilaut perlu diintegrasikan dengan VMS atau dengan operasi udara.

Tantangan berikutnya yang tidak kalah penting yaitu lahirnya PP Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia, kondisi tersebut menuntut instansi yang memiliki kapal pengawas dilaut untuk bersinergi baik ditingkat pengambil keputusan maupun ditingkat operasional lapangan.

B. Isu - Isu Strategis

B.1. Peran Pokmaswas

Indonesia merupakan negara kepulauan yang sangat luas dengan jumlah pulau mencapai 17.506 pulau, luas laut sekitar 5,8 juta km² dan bentangan garis pantai sepanjang 81.000 km. Berdasarkan wilayah dan lautan yang sangat luas tersebut, Indonesia memiliki potensi sumberdaya alam yang sangat besar, khususnya sumberdaya kelautan dan perikanan. Maka dari itu, dibutuhkan kolaborasi yang kuat diantara berbagai pihak untuk menjaga kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan.

Bangsa Indonesia telah memiliki rasa tanggungjawab terhadap upaya menjaga kekayaan sumberdaya kelautan dan perikanan. Hal tersebut tercermin dalam warisan adat dan budaya yang mendukung kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan seperti Awig-awig di Bali dan NTB, Sasi di Maluku, Panglima Laut di Aceh, dan sebagainya. Sebagai upaya pemberdayaan sumberdaya alam

B.2. Penguatan Armada Pengawasan SDKP

Dengan melihat keseriusan Pemerintah Indonesia dalam pemberantasan IllegalFishing, Pemerintah Jepang akan menghibahkan kapal pengawas. Berdasarkan penandatanganan Exchange of Notes (ENs) tanggal 14 Februari 2020, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendapatkan hibah dari Pemerintah Jepang berupa 2 (dua) unit Kapal Eks. Patroli Badan Perikanan Jepang yaitu "Hakurei Maru" dan "Shirahagi Maru". Kedua kapal tersebut memiliki panjang 63meter yang selanjutnya akan dikelola oleh Direktorat Jenderal PSDKP sebagai kapal pengawas kelautan dan perikanan.

Sebelum kedua kapal diserahkan ke KKP di Jakarta, Pemerintah Jepang melakukan penyempurnaan dan perbaikan kapal di Jepang dengan alokasi anggaran JPY 2,2 Miliar. Saat ini kedua kapal tersebut sedang dalam proses perbaikan di Galangan kapal Jepang dan dijadwalkan pengiriman kapal dari Jepang untuk diserahkan di Jakarta pada Tahun 2023. Sebanyak 2 unit Kapal tersebut nantinya akan digunakan untuk memperkuat armada pengawasan SDKP Republik Indonesia. Hal ini menunjukkan kemitraan yang cukup strategis antara Pemerintah Indonesia dan Jepang. Kerjasama ini di bidang kelautan dan perikanan khususnya dalam pengelolaan SDKP secara berkelanjutan.

B.3. Sinergitas Operasi Pengawasan

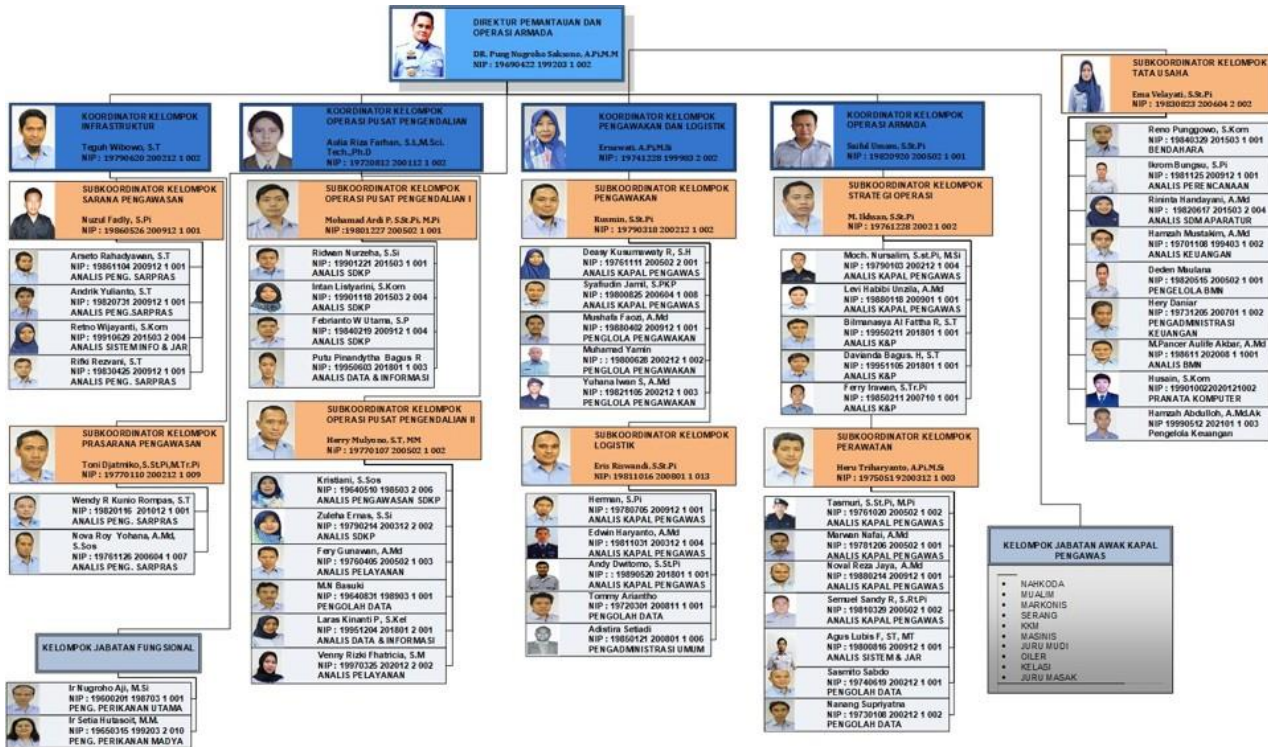
Sebagai negara yang memiliki wilayah laut yang sangat luas, Indonesia tentu memiliki beragam permasalahan seperti menghadapi berbagai kejahatan transnasional yang biasa terjadi di laut seperti: Illegal fishing, Penyelundupan barang, Penyelundupan narkoba, Trafficking/ Penyelundupan manusia dan boat people (manusia perahu), terorisme dan bajak laut.

Menjaga wilayah laut yang sangat luas tersebut, bukanlah pekerjaan yang mudah. Oleh karena itu diperlukan sinergitas dari semua pihak, antara lain: TNI-Angkatan Laut, POLRI-Direktorat Kepolisian Perairan, Kementerian Perhubungan-Ditjen Hubla, Kementerian Kelautan dan Perikanan-Ditjen PSDKP, Kementerian Keuangan-Ditjen Bea Cukai, Bakamla, dan Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Illegal (Satgas 115). Ke-tujuh lembaga penegak hukum tersebut melaksanakan patroli terkait dengan keamanan dilaut secara sektoral sesuai dengan kewenangan yang dimiliki berdasarkan peraturan perundang-undangan masing-masing.

C. Tugas dan Fungsi Direktorat POA

Tugas Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 48/PERMEN- KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pemantauan dan operasi armada.

Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat POA



Adapun Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada memiliki beberapa fungsi sebagai berikut

1. penyiapan perumusan kebijakan di bidang infrastruktur, peran serta masyarakat dalam membantu pengawasan, operasi pusat pengendalian pengawasan, pengawakan dan logistik armada pengawasan, dan operasi armada pengawasan;
2. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang infrastruktur, peran serta masyarakat dalam membantu pengawasan, operasi pusat pengendalian pengawasan, pengawakan dan logistik armada pengawasan, dan operasi armada pengawasan;
3. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang infrastruktur, peran serta masyarakat dalam membantu pengawasan, operasi pusat pengendalian pengawasan, pengawakan dan logistik armada pengawasan, dan operasi armada pengawasan;
4. penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang infrastruktur, peran serta masyarakat dalam membantu pengawasan, operasi

- pusat pengendalian pengawasan, pengawakan dan logistik armada pengawasan, dan operasi armada pengawasan;
5. penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang infrastruktur, peran serta masyarakat dalam membantu pengawasan, operasi pusat pengendalian pengawasan, pengawakan dan logistik armada pengawasan, dan operasi armada pengawasan; dan
 6. pelaksanaan urusan tata usaha dan kerumahtanggaan Direktorat.

D. Sistematika Penyajian

Sistematika Penyajian Laporan Kinerja Direktorat POA secara garis besar diuraikan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Menguraikan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi Direktorat POA, Ditjen. PSDKP tahun 2023 serta sistematika penyajian laporan.

Bab II Perencanaan Kinerja

Menguraikan rencana strategis Ditjen. PSDKP untuk periode 2020- 2024 dan perjanjian kinerja Direktorat POA tahun 2023.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Menguraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan selama tahun 2023.

Bab IV Penutup

Menguraikan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Direktorat POA, Ditjen. PSDKP periode Triwulan III 2023 dan merekomendasikan perbaikan kinerja di masa mendatang

BAB II

Perencanaan Kinerja

Arah Kebijakan KKP 2020-2024

Kementerian Kelautan dan Perikanan mengimplementasikan kebijakan Ekonomi Biru. Ekonomi biru merupakan konsep yang berupaya mewujudkan keseimbangan antara dua aspek, yaitu ekologi dan ekonomi. Ekonomi Biru tidak hanya melihat potensi kelautan sebagai komoditas ekonomi, tetapi juga menekankan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup di dalam ekosistem laut secara keseluruhan. Selain mengutamakan kesehatan laut, program strategis ini juga membuka peluang investasi, lapangan pekerjaan, dan pemerataan pertumbuhan ekonomi nasional melalui distribusi pertumbuhan ekonomi yang merata sehingga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat di daerah.

Adapun Kebijakan Ekonomi Biru terdiri atas 5 (lima) Program Turunan sebagai berikut :

➤ **Memperluas kawasan konservasi laut**

Kawasan Konservasi merupakan salah satu cara untuk menjaga laut tetap sehat karena menyediakan sarana untuk menurunkan tekanan terhadap keanekaragaman hayati laut, khususnya yang diakibatkan oleh penangkapan ikan berlebih dan kerusakan habitat akibat kegiatan manusia serta pembangunan. Kawasan konservasi laut yang dikelola dengan baik dapat memperbaiki dan bahkan meningkatkan populasi ikan, memberikan manfaat ekologis bagi ekosistem yang ada di sekitarnya, mempertahankan rantai makanan tetap sehat, merawat stabilitas ekosistem, memproduksi oksigen, serta menjaga fungsi serapan karbon.

➤ **Penangkapan Ikan Terukur berbasis Kuota**

Dalam beberapa tahun terakhir, beberapa komoditas sumber daya ikan di beberapa Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) memiliki status lebih tangkap karena mekanisme pengelolaan perikanan di Indonesia selama ini masih menggunakan pengendalian input (*input control*) dan menerapkan penarikan pungutan perikanan pada saat pra-produk. Penangkapan Ikan secara Terukur Berbasis Kuota adalah penangkapan ikan yang terkendali dan dilakukan berdasarkan kuota penangkapan ikan di enam zona yang telah ditentukan. Hal ini dalam rangka menjaga kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya serta pemerataan pertumbuhan ekonomi nasional.

➤ **Pembangunan budidaya laut, pesisir, dan darat yang berkelanjutan**

Mengurangi tekanan sumber daya ikan di laut, melalui pembangunan budidaya laut, pesisir, dan darat yang berkelanjutan. Kebijakan pengembangan perikanan budi daya yang akan dilakukan berbasis komoditas orientasi ekspor, konsumsi dalam negeri untuk mendukung ketahanan pangan dan peningkatan gizi masyarakat. Adapun komoditas unggulan dipilih berdasarkan analisis pangsa pasar, trend perkembangan produksi dan daya saing, yaitu: udang, lobster, kepiting, rumput laut dan ikan nila. Pengembangan perikanan budi daya secara umum akan dilakukan dengan dua cara yaitu revitalisasi kawasan budi daya seperti tambak rakyat/ tradisional dan implementasi modelling seperti budi daya tambak udang berbasis kawasan dan tambak udang terintegrasi.

➤ **Pengawasan dan pengendalian kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil**

Strategi dalam melaksanakan program utama pengelolaan berkelanjutan pesisir dan pulau-pulau kecil disusun untuk menyelesaikan permasalahan degradasi lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil serta pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dalam pembangunan yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Strategi tersebut dilakukan dengan mengurangi tekanan/dampak negatif dari kegiatan manusia; memperbaiki pulau kecil yang rusak; melindungi ekosistem pulau kecil terluar, pulau kecil kurang dari 100 km² dan pesisir; serta memenuhi fungsi pengawasan dan pengendalian.

➤ **Pembersihan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan atau Bulan Cinta Laut**

Gerakan ini menekankan pada partisipasi nelayan dan dilakukan untuk mengedukasi kesadaran masyarakat sekaligus mengampanyekan pentingnya menjaga laut agar tetap bersih sehingga ekosistem laut menjadi sehat. Bulan Cinta Laut mengajak nelayan untuk berperan aktif menjaga laut tetap sehat dengan mengambil sampah laut. Dalam kurun waktu satu bulan dalam satu tahun, nelayan diharapkan pergi melaut untuk mengumpulkan sampah di laut.

Arah Kebijakan Ditjen PSDKP 2020-2024

Rencana Strategis (Renstra) Ditjen. PSDKP 2020-2024 merupakan perencanaan jangka menengah yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai tugas dan fungsi yang diamanatkan. Renstra tersebut disusun selaras dengan arah kebijakan strategis nasional bidang kelautan dan perikanan 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam arah kebijakan KKP 2020-2024.

Sampai saat ini, rencana strategis Ditjen. PSDKP masih dalam proses sinkronisasi dengan kebijakan KKP. Adapaun proses penyusunan Renstra Ditjen. PSDKP sudah dilakukan dimulai akhir periodea renstra 2020-2024. Renstra disusun dengan menggunakan evaluasi renstra periode sebelumnya, asumsi yang dipertanggungjawabkan serta kombinasi pendekatan bottom up dan top down dengan keterlibatan Eselon I, Eselon II, Koordinator dan Sub Koordinator lingkup Ditjen PSDKP. Pendekatan top down mengandung makna bahwa perencanaan ini memperhatikan pula ketersediaan anggaran sesuai dengan estimasi APBN. Sedangkan pendekatan bottom up dilakukan untuk memperoleh gambaran kebutuhan pendanaan guna mewujudkan kondisi ideal.

Secara ringkas arah kebijakan Ditjen. PSDKP tahun 2020-2024 untuk mendukung Sasaran Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, diuraikan sebagai berikut:

- Pengembangan SDM Aparatur Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang berkualitas dan berdaya saing;
- Peningkatan kapasitas sarana, prasarana dan kelembagaan pengawasan SDKP;
- Penguatan sinergi dengan penegak hukum di laut (TNI AL, POLRI, Bakamla);
- Peningkatan komunikasi dengan stakeholder dan pelaku usaha kelautan dan perikanan;
- Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan SDKP

Bedasarkan arah kebijakan Pengawasan SDKP tersebut, ditetapkan sasaran strategis pencapaian dengan program kegiatan yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun kedepan. Sasaran strategis tersebut digunakan juga untuk penyusunan rencana kerja dan perjanjian kinerja Ditjen. PSDKP.

1. Pencapaian Kebijakan Pengembangan SDM Aparatur Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang berkualitas dan berdaya saing, dilakukan melalui:
 - Membangun budaya kerja Ditjen PSDKP
 - Mengembangkan kompetensi SDM Aparatur PSDKP
 - Membangun pola karir PNS Ditjen. PSDKP
 - Meningkatkan jumlah dan sebaran SDM Aparatur PSDKP
2. Pencapaian Kebijakan Peningkatan kapasitas sarana, prasarana dan kelembagaan pengawasan SDKP, dilakukan melalui:
 - Membangun sarana pengawasan (kapal pengawas, speed boat dan sarana pengawasan lainnya)
 - Membangun infrastruktur pengawasan yang memadai
 - Meningkatkan pemeliharaan kapal pengawas agar siap operasional
 - Mengembangkan kelembagaan pengawasan
3. Pencapaian Kebijakan Penguatan sinergi dengan penegak hukum di laut (TNI AL, POLRI, Bakamla), dilakukan melalui:
 - Operasi bersama pengawasan di laut Pertukaran data
 - Penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan
 - Peningkatan kapasitas SDM Pengawasan
4. Pencapaian Kebijakan Peningkatan komunikasi dengan stakeholder dan pelaku usaha kelautan dan perikanan, dilakukan melalui:
 - Memperkuat sinergitas dan harmonisasi pengawasan SDKP dengan Pemerintah Daerah serta lintas sektor di tingkat Pusat
 - Memelihara komitmen bersama dengan lembaga internasional dan regional dalam pemberantasan IUU fishing
 - Menjalankan alur pendekatan pengawasan secara komprehensif, yakni: pencegahan (preventif), pembinaan, represif (ultimum remedium).
 - Menerapkan metode auditing dalam pengawasan SDKP yang

mengedepankan upaya perbaikan berkelanjutan terhadap temuan ketidaksesuaian bagi para pelaku usaha kelautan dan perikanan

5. Pencapaian Kebijakan Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan SDKP, dilakukan melalui:

- Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan SDKP yang tertib dan bertanggung jawab
- Pemberian pemahaman kepada nelayan untuk tidak melintas batas ke perairan negara lain
- Optimalisasi peranserta masyarakat dalam mendukung pengawasan SDKP melalui POKMASWAS
- Menanamkan pengetahuan pengelolaan SDKP yang bertanggung jawab sejak dini melalui “PSDKP Mengajar” Meningkatkan peran aktif pemuda melalui “Pemuda Pelopor Pengawasan”
- Memberikan apresiasi dan penghargaan kepada Pokmaswas yang berkontribusi besar
- Peningkatan komunikasi dengan stakeholder dan pelaku usaha kelautan dan perikanan;
- Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan SDKP

Kegiatan Pemantauan dan Operasi Armada

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 Tahun 2020, Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pemantauan dan operasi armada

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang infrastruktur, peran serta masyarakat dalam membantu pengawasan, operasi pusat pengendalian pengawasan, pengawakan dan logistik armada pengawasan, dan operasi armada pengawasan;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang infrastruktur, peran serta masyarakat dalam membantu pengawasan, operasi pusat pengendalian pengawasan, pengawakan dan logistik armada pengawasan, dan operasi armada pengawasan;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang infrastruktur, peran serta masyarakat dalam membantu pengawasan, operasi pusat pengendalian pengawasan, pengawakan dan logistik armada pengawasan, dan operasi armada pengawasan;
- d. penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang infrastruktur, peran serta masyarakat dalam membantu pengawasan, operasi pusat pengendalian pengawasan, pengawakan dan logistik armada pengawasan, dan operasi armada pengawasan;
- e. penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang infrastruktur, peran serta masyarakat dalam membantu pengawasan, operasi pusat pengendalian pengawasan, pengawakan dan logistik armada pengawasan, dan operasi armada pengawasan; dan
- f. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Perjanjian Kinerja Dit. POA

Dalam mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi hasil pada tahun 2023, dibuat dokumen perjanjian kinerja sebagaimana terdapat pada lampiran 1. Adapun Rincian Indikator Kinerja yang menjadi target pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat yang partisipatif	1	Indeks kualitas supervisi pembinaan Pokmaswas (indeks)	80
2	Terselenggaranya sistem pemantauan SDKP yang akurat	2	Indeks pemenuhan data dan analisis hasil pemantauan untuk operasi pengawasan SDKP (indeks)	80
3	Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif	3	Indeks kinerja operasi pesawat patroli	93
		4	Indeks kinerja operasi kapal pengawas	87,6
4	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan	5	Persentase penyelesaian pembangunan sarana Pengawasan SDKP Kapal Pengawas Kelas II (%)	100
		6	Persentase penyelesaian perawatan sarana Pengawasan SDKP (%)	100
5	Tata Kelola Pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP	7	Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SPKP (Sistem Pemantauan Kapal Perikanan) (Indeks)	80
		8	Persentase penyelesaian rancangan NSPK bidang pengawasan SDKP lingkup Direktorat POA (%)	100
		9	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Direktorat POA (%)	100
		10	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat POA (Indeks)	78

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET
		11 Tingkat pemahaman peserta Bimtek lingkup Direktorat POA (%)	77
		12 Nilai Rekonsiliasi Kinerja Lingkup Direktorat POA (Nilai)	90
		13 Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Direktorat POA yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	75
		14 Persentase Realisasi Anggaran Lingkup Direktorat POA (%)	99,4
		15 Nilai Implementasi Program Budaya Kerja (Nilai)	21
		16 Jumlah inovasi yang dihasilkan (inovasi)	1
		17 Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Direktorat POA (%)	92
		18 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Direktorat POA (%)	77,5
		19 Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Direktorat POA (%)	77,5

ALOKASI ANGGARAN

Dalam mendukung Indikator Kinerja tersebut, dialokasikan anggaran dalam merealisasikan Rincian Output Lingkup Direktorat POA ditabulasikan sebagai berikut:

RINCIAN OUTPUT	VOLUME RO	ANGGARAN
Surat Keterangan Aktivasi Transmitter (SKAT) yang diterbitkan	5100 Produk	2,750,000,000
NSPK Pemantauan dan Operasi Armada	4 NSPK	225,000,000
Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan SDKP yang Dipantau	3 Laporan	500,000,000
Operasional Pembinaan POKMASWAS yang Dipantau	34 Laporan	140,000,000
Operasi Kapal Pengawas	90 Hari Operasi	189,658,206,000
Operasi Pesawat Patroli	150 Operasi	41,250,000,000
Kapal Pengawas	2 Unit	233,387,080,000
Armada Pengawasan SDKP yang Dirawat	12 Unit	31,273,330,000
Sistem Pemantauan SDKP Terintegrasi yang Operasional	1 Unit	11,419,045,000
TOTAL		510,602,661,000

BAB III

Akuntabilitas Kinerja

Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja Direktorat POA Triwulan III 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi Indikator Kinerja pada masing-masing Sasaran Kegiatan. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh nilai capaian kinerja Direktorat POA sebesar **110,86%** dengan capaian indikator NPSS berwarna **BIRU** dengan kategori **ISTIMEWA**. Nilai tersebut berasal dari capaian kinerja pada masing-masing perspektif sebagaimana disajikan pada tabel Capaian Kinerja Organisasi berikut:

Tabel 2. Capaian Kinerja Direktorat POA Triwulan III 2023

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Capaian	%
01 Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat yang partisipatif	01 Indeks kualitas supervisi pembinaan Pokmaswas (Indeks)	40	61.58	155
02 Terselenggaranya sistem pemantauan SDKP yang akurat	02 Indeks Pemenuhan data dan analisis hasil pemantauan untuk operasi pengawasan SDKP (indeks)	60	75	120
03 Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif	03 Indeks Kinerja operasi pesawat patroli (indeks)	93	98.51	105.92
	04 Indeks Kinerja operasi kapal pengawas (indeks)	87.6	96.19	109.81
04 Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan	05 Persentase Penyelesaian pembangunan sarana Pengawasan SDKP Kapal Pengawas Kelas II (%)	100	-	-
	06 Persentase penyelesaian perawatan sarana Pengawasan SDKP (%)	100	100	100

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Capaian	%
05 Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP	07 Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (Indeks)	80	97	117.94
	08 Persentase Penyelesaian rancangan NSPK bidang pengawasan SDKP lingkup Direktorat POA (%)	60	-	-
	09 Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Direktorat POA (%)	100	100	100
	10 Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat POA (Indeks)	78	-	-
	11 Tingkat pemahaman peserta Bimtek lingkup Direktorat POA (%)	77	-	-
	12 Nilai rekonsiliasi kinerja lingkup Direktorat POA (Nilai)	90	-	-

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Capaian	%
05 Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP	13 Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Direktorat POA yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	75	100	133
	14 Persentase Realisasi Anggaran lingkup Direktorat POA (%)	99.4	-	-
	15 Nilai Implementasi Program Budaya Kerja (Nilai)	21	-	-
	16 Jumlah inovasi yang dihasilkan (inovasi)	1	-	-
	17 Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Direktorat POA (%)	92	-	-
	18 Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup Direktorat POA (%)	77.5		
	19 Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup Direktorat POA (%)	77.5	-	-

Nilai Capaian Kinerja Direktorat POA

110.86

SASARAN KEGIATAN 1

TERSELENGGARANYA SISTEM PENGAWASAN BERBASIS MASYARAKAT YANG PARTISIPATIF

Pencapaian Sasaran Kegiatan "Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat yang partisipatif" didukung oleh satu Indikator Kinerja Utama, yaitu: "Indeks kualitas supervisi pembinaan Pokmaswas".

1-Indeks Kualitas Supervisi Pokmaswas

Sistem pengawasan berbasis masyarakat adalah pendekatan dalam menjaga keamanan dan ketertiban dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Pendekatan ini mengandalkan peran serta masyarakat dalam memantau lingkungan mereka, mendeteksi potensi masalah atau ancaman, serta berkontribusi dalam penanganan situasi yang mungkin mengganggu keamanan dan ketertiban.

Indikator ini digunakan untuk mengukur sejauh mana kualitas pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan provinsi kepada Pokmaswas. Supervisi diperlukan

Supervisi oleh Satker Pusat untuk kegiatan pembinaan Pokmaswas oleh Pemda Provinsi perlu dilakukan karena beberapa alasan berikut:

- ♦ **Koordinasi dan Pengawasan,** Supervisi oleh Satker Pusat memungkinkan adanya koordinasi dan pengawasan yang efektif terhadap kegiatan pembinaan Pokmaswas oleh Pemda Provinsi. Dengan adanya supervisi, Satker Pusat dapat memastikan bahwa kegiatan dilaksanakan sesuai dengan pedoman dan peraturan yang berlaku.
- ♦ **Peningkatan Kualitas,** Supervisi dapat membantu dalam meningkatkan kualitas pembinaan Pokmaswas. Satker Pusat dapat memberikan arahan, bimbingan, dan saran yang diperlukan untuk memperbaiki dan mengoptimalkan kegiatan pembinaan

- ♦ **Monitoring dan Evaluasi**, Melalui supervisi, Satker Pusat dapat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pembinaan Pokmaswas. Hal ini penting untuk memastikan bahwa tujuan dan indikator kinerja tercapai dengan baik.
- ♦ **Pengalaman dan Pengetahuan**, Satker Pusat memiliki pengalaman dan pengetahuan yang luas dalam pembinaan Pokmaswas. Dengan melakukan supervisi, mereka dapat berbagi pengalaman terbaik dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada Pemda Provinsi dalam melaksanakan kegiatan pembinaan

Dengan melakukan supervisi oleh Satker Pusat, diharapkan bahwa kegiatan pembinaan Pokmaswas oleh Pemda Provinsi dapat berjalan dengan lebih efektif, efisien, dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Indeks kualitas supervisi pembinaan POKMASWAS dinilai terhadap kualitas kegiatan Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada dalam melakukan supervisi terhadap pembinaan POKMASWAS yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan. Hasil pembinaan tersebut wajib dikirimkan dalam bentuk laporan pembinaan POKMASWAS dengan merujuk pada Komponen kegiatan yang dinilai antara lain:

Gambar 2. Komponen penilaian indeks kualitas supervisi Pokmaswas



Tabel 3. Target dan Realisasi IKU-1 Triwulan III 2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%	RENSTRA		
				T	R	%
Indeks kualitas supervisi pembinaan Pokmaswas	Indeks 40	Indeks 61,85	155	-	-	-

Berdasarkan tabel diatas, realisasi capaian pada Triwulan III 2023 melampaui target yang ditetapkan yaitu tercapai sebesar Indeks 61,85 dari target Indeks 40 dengan persentase capaian sebesar 155%. Indikator kinerja ini belum dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena merupakan indikator baru, hasil penyempurnaan Indikator Kinerja 2023 dimana dilakukan perubahan penjenjangan kinerja dari level 1. Demikian pula halnya dengan perbandingan dengan Renstra 2020-2024, IKU ini belum dapat dibandingkan karena memang belum disetujui masuk ke dalam revisi Renstra KKP.

Dengan capaian tersebut, dapat dimaknai sebagai sebuah indikasi bahwa target yang ditetapkan telah tercapai dengan maksimal.

Beberapa kegiatan yang dilakukan untuk mendukung tercapainya indikator kinerja ini antara lain:

1. Penyusunan Rencana Kegiatan Pembinaan Pokmaswas Tahun 2023
2. Pembahasan rencana Pembinaan Pokmaswas dengan DKP Jawa Barat
3. Penyiapan Booklet Pokmaswas
4. Penyiapan PIN Pokmaswas
5. Penyiapan PIN Pokmaswas
6. Pencetakan Kartu Tanda Anggota Pokmaswas.

Alokasi anggaran Tahun 2023 untuk mendukung tercapainya IKU 1 ini sebesar Rp 140.000.000 dan hingga periode Triwulan III 2023 ini telah direalisasikan sebesar Rp 127.428.510,- atau 91,02% dari total pagu.

SASARAN KEGIATAN 2

TERSELENGGARANYA SISTEM PEMANTAUAN SDKP YANG AKURAT

Pencapaian Sasaran Kegiatan "Terselenggaranya Sistem Pemantauan SDKP yang akurat" didukung oleh satu Indikator Kinerja Utama, yaitu: "Indeks Pemenuhan data dan analisis hasil pemantauan untuk operasi pengawasan SDKP".

2-Indeks Pemenuhan Data dan Analisis Hasil Pemantauan untuk Operasi Pengawasan SDKP

Indikator Kinerja "Indeks Pemenuhan Data dan Analisis Hasil Pemantauan Untuk Operasi Pengawasan SDKP" bertujuan untuk mendukung operasi pengawasan SDKP merupakan pengukuran pemenuhan data dan analisis hasil pemantauan yang disiapkan oleh Direktorat POA kepada user pengguna hasil analisis. Analisis yang diberikan bersumber dari data Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP) dan Automatic Identification System (AIS).

Rincian capaian IKU 2 Direktorat POA periode Triwulan III 2023 ditabulasikan pada tabel berikut:

Tabel 4 Target dan Realisasi IKU-2 Triwulan III 2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%	TW III 2022			RENSTRA 2024		
				T	R	%	T	R	%
Indeks Pemenuhan Data dan Analisis Hasil Pemantauan Untuk Operasi Pengawasan SDKP	Indeks 60	Indeks 75	125%	Indeks 60	Indeks 66,67	111	Indeks 80	Indeks 75	54,16

Berdasarkan tabel di atas, target untuk IKU 2 dapat dicapai secara maksimal, bahkan melampaui target. Jika dibandingkan dengan capaian periode yang sama pada Tahun 2022, terdapat kenaikan sebesar 14%. Kenaikan capaian ini dipengaruhi oleh terpenuhinya seluruh komponen yang merupakan upaya maksimal dari Direktorat POA khususnya kelompok Operasi Pusat Pengendalian (Pusdal) Pengawasan SDKP.

Bila dibandingkan dengan target akhir periode Renstra 2020-2024 baru mencapai 54.16%, dimana pada masa akhir Renstra ditargetkan "Indeks 80" sementara capaian baru pada posisi "Indeks 75". Hal ini tentunya akan dilakukan percepatan pencapaian target pada tahun 2024.

Indikator ini dipengaruhi oleh 4 sub indikator yaitu: Indikasi Pelanggaran, Analisis Kapal di Kawasan Konservasi, Analisis Kapal Pengangkut Ikan Hidup, dan Data untuk Operasi Kapal Pengawas/Airborne Surveillance

Tabel 5 rincian per komponen IKU indeks pemenuhan data dan analisis hasil pemantauan untuk operasi pengawasan SDKP

No	Indikator	Bulan									Bobot	Perhitungan
		1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	Indikasi Pelanggaran	1	1	1	1	1	1	1	1	1	40	30
2	Analisis Kapal di Kawasan Konservasi	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20	15
3	Analisis Kapal Pengangkut Ikan Hidup	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20	15
4	Data untuk Ops Kapal Pengawas/Airborne Surveillance	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20	15
Indeks												75.00

1. Indikasi Pelanggaran

Indikasi pelanggaran adalah sebuah analisis yang dilakukan terhadap kapal-kapal ikan yang terdaftar di dalam sistem pemantauan kapal perikanan berkaitan dengan berbagai indikasi pelanggaran pengelolaan sumber daya perikanan.

Jenis-jenis indikasi pelanggaran antara lain pelanggaran Daerah Penangkapan Ikan (DPI), laut lepas, pelabuhan pangkal, Jalur Penangkapan, beroperasi di kawasan konservasi dan kegiatan-kegiatan lainnya yang dilarang.

Hasil analisis tersebut lalu diterbitkan semacam laporan "Indikasi Pelanggaran" selama periode tertentu sesuai dengan kebutuhan. Untuk diketahui, Selama periode Triwulan III 2023, Pusdal PSDKP telah menerbitkan analisis indikasi pelanggaran kapal perikanan **sebanyak 1.004** kapal dengan rincian sebagaimana pada Tabel dibawah sebagai berikut:

Tabel 6 Rincian analisis pelanggaran periode Januari sd Juni 2023

No	Indikasi Pelanggaran	Bulan									Total
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Daerah Penangkapan Ikan (WPP)	153	132	151	50	39	35	32	37	46	675
2	Daerah Penangkapan Ikan (Laut Lepas)	14	2	10	5	4	0	6	5	2	48
3	Daerah Penangkapan Ikan (Luar Negeri)	19	4	22	7	2	0	0	0	0	54
4	Daerah Penangkapan Ikan (Jalur Penangkapan)	22	19	35	42	39	24	9	6	27	223
5	Pelabuhan Pangkal/Muat	0	1	2	0	0	0	0	0	0	3
6	Beroperasi tanpa SIPI/SIKPI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Kawasan Konservasi	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	TOTAL	208	158	220	104	85	59	47	48	75	1004

2. Analisis Kapal di Kawasan Konservasi

Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan yang merupakan turunan dari Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, dan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan UU 31/2004, menjelaskan bahwa konservasi sumber daya ikan adalah upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya ikan, termasuk ekosistem, jenis dan genetik untuk menjamin keberadaan, ketersediaan dan kesinambungannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman sumber daya ikan. Dalam konteks konservasi sumber daya ikan, konservasi ekosistem merupakan upaya melindungi, melestarikan dan memanfaatkan fungsi ekosistem sebagai habitat penyangga kehidupan biota perairan pada waktu sekarang dan yang akan datang.

Sesuai dengan peraturan tersebut Kelompok Bidang Operasi Pusat Pengendalian pada bulan September 2023 dilakukan pemantauan terhadap Kawasan Konservasi Perairan di Indonesia dan terdapat 216 kapal berizin pusat yang terpantau melakukan indikasi kegiatan penangkapan dan/atau labuh di dalam kawasan konservasi.

3. Analisis Kapal Pengangkut Ikan Hidup

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 32/PERMEN-KP/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 15/PERMEN-KP/2016 tentang Kapal Pengangkut Ikan Hidup, dinyatakan bahwa setiap kapal pengangkut ikan hidup berbendera asing diizinkan masuk ke wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia paling banyak 12 (dua belas) kali dalam 1 (satu) tahun.

Berdasarkan ketentuan tersebut, sampai dengan bulan Juni 2023 Direktorat POA telah melakukan pemantauan terhadap **39 kapal** pengangkut ikan hidup.

4. Data untuk Ops Kapal Pengawas/Airborne Surveillance

Penyiapan data kapal perikanan berdasarkan sistem pemantauan kapal perikanan (SPKP) dan Automatic Identification System (AIS) dilaksanakan dalam rangka mendukung operasi kapal pengawas dan pelaksanaan airborne surveillance. Pada Triwulan III 2023 telah dilaksanakan penerbitan data untuk operasi kapal pengawas yang dilakukan setiap bulan.

Alokasi anggaran Tahun 2023 untuk mendukung tercapainya IKU 2 ini sebesar **Rp 5.419.045.000**, dan sampai dengan Triwulan III 2023 telah terealisasi sebesar **Rp 2.846.409.731,-** atau **52,53%** dari total pagu.

SASARAN KEGIATAN 3

TERSELENGGARANYA OPERASI ARMADA PENGAWASAN SDKP YANG EFEKTIF

Pencapaian Sasaran Kegiatan "Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang Efektif" diukur dengan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama, yaitu: (1) Indeks Kinerja Operasi Pesawat Patroli (indeks), (2) Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas (indeks).

3-Indeks Kinerja Operasi Pesawat Patroli

Indeks Kinerja Operasi Pesawat Patroli adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu menentukan dan mengukur kemajuan terhadap operasional Pesawat Patroli agar terwujudnya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif. Indeks Kinerja Operasi Pesawat Patroli terdiri dari indikator kuantitatif dan kualitatif yang dikuantitatifkan, yakni:

1. Jumlah Kapal Perikanan yang Diperiksa;
2. Persentase Coverage Area Pengawasan;
3. Persentase Capaian Hari Operasi;
4. Persentase Jumlah Tindak Lanjut atas Target Operasi yang diberikan;
5. Persentase Jumlah Kapal yang di Validasi;
6. Persentase Operasi di Wilayah WPPNRI yang Rawan dan IUUF yang tinggi KIA (WPPNRI 571, 711, 716, 717);
7. Dukungan Kegiatan Pesawat Patroli terhadap pemantauan Wilayah Pesisir, Pulau-pulau kecil, dan Kawasan Konservasi;
8. Dukungan Kegiatan Pesawat Patroli terhadap Patroli Terkoordinasi Regional, Nasional dan Internasional;
9. Jumlah Dukungan kegiatan lainnya (Misi SAR, Kemanusiaan, Dukungan Pimpinan & MKP).

Tabel 7 Rincian capaian IKU 3 Direktorat POA Triwulan III 2023

INDIKATOR KINERJA	TW III 2022			TW III 2023			RENSTRA 2024		
	T	R	%	T	R	%	T	R	%
Indeks Kinerja Pesawat Patroli	Indeks 92,00	Indeks 97,23	105,43	Indeks 93	Indeks 98,51	105,92	-	-	-

Berdasarkan tabel diatas, realisasi capaian pada Triwulan III 2023 melampaui target yang ditetapkan dengan pencapaian kinerja sebesar 98,51 dengan persentase capaian sebesar 105,92%. Jika dibandingkan dengan capaian periode yang sama pada Tahun 2022, mengalami kenaikan sebesar 0,49% Capaian ini mengindikasikan bahwa target yang ditetapkan telah tercapai dengan maksimal. Hal ini tentunya tidak terlepas dari upaya pembinaan yang dilakukan selama periode bulanan secara langsung oleh Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada. Indikator ini belum dapat dibandingkan dengan target akhir Renstra 2024.

Selama periode operasi Triwulan III 2023 telah dilaksanakan sebanyak 21 (dua puluh satu) periode operasi. Dari pelaksanaan operasi tersebut diperoleh sebanyak 80 hari operasi. Pesawat yang digunakan antara lain: "MPA ATR 42-300 PK-YRE" dan "Hawker 900XP".

Operasi dilaksanakan secara terintegrasi dengan armada kapal pengawas dilaut antara lain:

- | | | |
|----|-------------------------|---|
| 1 | Periode I | : Operasi Mandiri |
| 2 | Periode I-A | : KP. Orca 03 |
| 3 | Periode II | : Operasi Mandiri |
| 4 | Periode II-A | : KP. Orca 03 |
| 5 | Periode III | : Operasi Mandiri |
| 6 | Periode III-A | : KP. Orca 03, Hiu Macan Tutul 02, dan Hiu 15 |
| 7 | Periode III-B dan III-C | : Operasi Mandiri |
| 8 | Periode III-D | : Operasi Mandiri |
| 9 | Periode IV | : Operasi Mandiri |
| 10 | Periode IV-A | : Operasi Mandiri |
| 11 | Periode V | : KP. Orca 01 |
| 12 | Periode V-A | : Operasi Mandiri |
| 13 | Periode V-B | : Operasi Mandiri |
| 14 | Periode VI | : KP. Hiu Macan Tutul 02 |
| 15 | Periode VI-A | : Operasi Mandiri |
| 16 | Periode VII | : KP. Orca 03 |
| 17 | Periode VII-A | : Operasi Mandiri |
| 18 | Periode VII-B | : KP. Orca 02 |
| 19 | Periode VIII | : KP. Paus 01 |
| 20 | Periode VIII-A | : KP. Orca 02 |
| 21 | Periode IX | : Operasi Mandiri |

Adapun Hasil Operasi Pesawat Patroli terdapat pada Lampiran 1 tentang Rincian Hasil Operasi Pesawat Patroli

Untuk mendukung keberhasilan pencapaian atas kinerja tersebut dipengaruhi beberapa hal sebagai berikut:

1. Responsif terhadap realisasi penggunaan pesawat udara harian sehingga dapat menyesuaikan volume harian penggunaan jam operasi.
2. Pergerakan pesawat udara dilaksanakan pada wilayah-wilayah prioritas dengan indikasi kerawanan sedang dan tinggi serta menambah target operasi pengawasan kelautan yang berada pada wilayah-wilayah yang beririsan dengan pengawasan perikanan sehingga meningkatkan capaian operasi;
3. Mengurangi volume ferry flight secara signifikan.

Alokasi anggaran Tahun 2023 untuk mendukung tercapainya IKU 3 ini sebesar **Rp41.250.000.000** dan sampai dengan Triwulan III 2023 telah terealisasi sebesar **Rp36.641.963.767** atau **88,83%** dari total pagu.

4- Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas

Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu menentukan dan mengukur kemajuan terhadap operasi Kapal Pengawas agar terwujudnya pengendalian dan pengawasan SDKP yang profesional dan partisipatif. Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas terdiri dari indikator kuantitatif dan kualitatif yang dikuantitatifkan sebanyak 9 variabel, dengan rincian sebagai berikut:

1. Jumlah Kapal Perikanan yang Diperiksa;
2. Persentase Coverage Area Pengawasan;
3. Persentase Capaian Hari Operasi;
4. Persentase Jumlah Tindak Lanjut atas Target Operasi yang diberikan;
5. Jumlah Tangkapan Kapal Pelaku IUU Fishing;
6. Jumlah Penyitaan Alat Tangkap Terlarang;
7. Jumlah Pemutusan Rumpon Ilegal;
8. Dukungan Kegiatan Kapal Pengawas terhadap Kegiatan Nasional, Regional, dan Internasional;
9. Dukungan Kegiatan Sosial dan Penyelamatan.

Tabel 8 Rincian capaian IKU 4 Direktorat POA Triwulan III 2023

INDIKATOR KINERJA	TW III 2022			TW III 2023			RENSTRA 2024		
	T	R	%	T	R	%	T	R	%
Indeks Kinerja Kapal Pengawas	Indeks 87,5	Indeks 85,14	97,30	Indeks 87,6	Indeks 96,19	109,81	Indeks 89	Indeks 96,19	108,08%

Berdasarkan tabel di atas, realisasi capaian pada Triwulan III 2023 melampaui target yang ditetapkan dengan pencapaian kinerja sebesar 96,19 dengan persentase capaian sebesar 109,81%. Jika dibandingkan dengan capaian periode yang sama pada Tahun 2022, terdapat kenaikan sebesar 12,51%. Capaian ini tentunya tidak terlepas dari upaya pembinaan yang dilakukan periode bulanan secara langsung oleh Direktur Pemantauan dan Operasi Armada. Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024 yaitu sebesar indeks 89, realisasi mencapai indeks 96,19 melebihi dari target yang ditentukan.

untuk mendukung capaian IKU Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas telah dilaksanakan Operasi Mandiri Kapal Pengawas Pusat dengan jumlah hari operasi mandiri 10 Kapal Pengawas sebanyak 556 hari operasi dengan rata-rata hari operasi setiap kapal pengawas sebanyak 55,6 hari operasi.

Tabel 9 Hasil Operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan Ditjen PSDKP sampai dengan triwulan III 2023

NO	NAMA KAPAL PENGAWAS	HARI OPS	JAM LAYAR	DIPERIKSA			DITANGKAP		
				KII	KIA	JML	KII	KIA	JML
1	KP. ORCA 01	97	1217,32	109	5	114	15	5	20
2	KP. ORCA 02	71	871,09	153	1	154	3	1	4
3	KP. ORCA 03	61	1027,08	177	1	178	0	1	1
4	KP. ORCA 04	53	486	53	0	53	2	0	2
5	KP. ORCA 05	44	672,5	137	0	137	3	0	3
6	KP. ORCA 06	0	0	0	0	0	0	0	0
7	KP. HIU MACAN TUTUL 01	37	367	61	0	61	2	0	2
8	KP. HIU MACAN TUTUL 02	67	950,4	142	0	142	1	0	1
9	KP. PAUS 01	62	1036,83	137	0	137	12	0	12
10	KP. AKAR BAHAR 01	64	506,79	2	0	2	0	0	0
JUMLAH TOTAL		556	7135,01	971	7	978	38	7	45

Untuk mendukung keberhasilan pencapaian atas kinerja tersebut dipengaruhi beberapa hal sebagai berikut:

1. Dukungan logistik kapal pengawas yang optimal dan tepat waktu;
2. Dukungan data dan informasi dari sistem pemantauan SDKP.

Sampai dengan triwulan III tahun 2023, terjadi fluktuasi harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Hal tersebut mengakibatkan beberapa komponen dalam indeks kinerja operasi kapal pengawas tidak dapat tercapai secara maksimal, diantaranya target riksa kapal perikanan. Adapun pada triwulan III tahun 2023, riksa ditargetkan sebesar 998 kapal, sementara jumlah riksa yang tercapai adalah sebesar 978 kapal. Direktorat POA menilai pelaksanaan operasi harus dilakukan secara selektif sehingga ketersediaan anggaran BBM dapat terjaga hingga akhir tahun.

Alokasi anggaran Tahun 2023 untuk mendukung tercapainya IKU 4 ini sebesar Rp 189.658.206.000,- dan sampai dengan triwulan III 2023 telah terealisasi sebesar Rp 107.476.574.619,- atau 56,67% dari total pagu.

SASARAN KEGIATAN 4

TERSELENGGARANYA PEMBANGUNAN SERTA PERAWATAN SARANA DAN PRASARANA PENGAWASAN SDKP YANG SESUAI KETENTUAN

Pencapaian Sasaran Kegiatan 4 diukur dengan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama, yaitu: (1) Persentase Penyelesaian Pembangunan Sarana Pengawasan SDKP Kapal Pengawas Kelas II dan (2) Persentase Penyelesaian Perawatan Sarana Pengawasan SDKP.

5- Persentase Penyelesaian Pembangunan Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP

Indikator Kinerja "Persentase Penyelesaian Pembangunan Sarana Pengawasan SDKP Kapal Pengawas Kelas II" IKU ini bertujuan untuk mengukur persentase penyelesaian jumlah armada dan fasilitas pendukung pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang akan dibangun di tahun berjalan.

Pada tahun 2023 terdapat Pengadaan sebanyak 2 (dua) unit Kapal Pengawas Perikanan kelas II yang dilakukan Multi Years Contract (MYC) Tahun anggaran 2022-2023. Untuk Progres Pembangunan Pengadaan Kapal Pengawas Perikanan Kelas II (MYC) Akhir Triwulan III tahun 2023 adalah sebesar 77,274%

Rincian capaian IKU 5 Direktorat POA periode Tahun 2023 ditabulasikan pada tabel berikut:

Tabel 10 Rincian capaian IKU 5 Direktorat POA Triwulan III 2023

INDIKATOR KINERJA	TW III 2022			TW III 2023			RENSTRA 2024		
	T	R	%	T	R	%	T	R	%
Persentase Penyelesaian Pembangunan Sarana Pengawasan SDKP Kapal Pengawas Kelas II	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Indikator “Persentase Penyelesaian Pembangunan Sarana Pengawasan SDKP Kapal Pengawas Kelas II” merupakan indikator baru pada tahun 2023 sehingga realisasi tidak dapat dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya. Pencapaian IKU Persentase Penyelesaian Pembangunan Sarana Pengawasan SDKP Kapal Pengawas Kelas II pada Triwulan III belum dapat dihitung dikarenakan target capaian dihitung di akhir tahun. Untuk target Renstra 2020-2024 juga tidak ada.

Adapun langkah-langkah yang ditempuh untuk dapat mencapai target tersebut diatas, antara lain:

1. Melakukan rapat koordinasi/pengendalian rutin dengan PT. Palindo Marine selaku penyedia, PT. Zatria Awan Consultant sebagai konsultan pengawas, PT. Biro Klasifikasi Indonesia sebagai badan klasifikasi, Inspektorat Jenderal KKP, tim desain Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan pihak terkait lainnya untuk membahas progres dan kendala serta solusinya selama pelaksanaan pekerjaan;
2. Melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi secara langsung di lapangan (galangan) dengan didampingi tim desain BRIN, tim Itjen KKP, konsultan pengawas dan pihak terkait lainnya;
3. PPK memberikan surat instruksi yang diperlukan kepada penyedia dan konsultan pengawas;
4. Melakukan open management dengan melibatkan Kejaksaan RI, Bareskrim Polri, BPKP, Itjen KKP, LKPP dan pihak terkait lainnya.

Alokasi anggaran Tahun 2023 untuk mendukung tercapainya IKU 5 ini sebesar Rp 193.552.080.000 dan sampai dengan triwulan III 2023 telah terealisasi sebesar Rp 40.049.575.084,- atau 20,69% dari total pagu.

6- Persentase Penyelesaian Perawatan Sarana Pengawasan SDKP

Indikator Kinerja “Persentase Penyelesaian Perawatan Sarana Pengawasan SDKP” IKU ini bertujuan untuk mengukur jumlah armada pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang siap operasi pada tahun 2023.

Perawatan Sarana Pengawasan SDKP pada periode Triwulan III 2023 terdiri dari: perawatan pencegahan (*preventive maintenance*), perawatan prediktif (*predictive maintenance*), dan perawatan darurat (*breakdown maintenance*) dengan rincian sebagai berikut:

1. Perawatan Pencegahan (*Preventive maintenance*) merupakan kegiatan perawatan yang dilakukan secara rutin setiap bulan, kegiatan ini dilakukan sebagai langkah pencegahan terhadap resiko kerusakan dini (*preventive maintenance*) pada kapal. Perawatan rutin diharapkan dapat menjaga dan memelihara kondisi kapal pengawas agar selalu dalam keadaan siap operasi.
2. Perawatan Prediktif (*Predictive maintenance*) merupakan kegiatan perawatan yang dilakukan secara memprediksi kerusakan yang akan timbul pada kapal pengawas, kegiatan ini dilakukan sebagai langkah untuk perawatan kapal pengawas yang bersifat periode. Perawatan prediktif diharapkan dapat menjaga dan memelihara kondisi kapal pengawas agar selalu dalam keadaan siap operasi.
3. Perawatan Darurat (*Breakdown maintenance*) merupakan perawatan yang dilaksanakan dalam rangka menangani/memperbaiki kerusakan yang terjadi diatas kapal akibat kejadian yang tidak terduga (*unpredicted*), kegiatan perbaikan ini sangat penting untuk segera dilakukan agar tidak terjadi kerusakan lanjutan yang lebih fatal. Perbaikan darurat dapat dilaksanakan melalui pihak ketiga atau dengan cara swakelola sesuai batas kemampuan teknis yang dimiliki Awak Kapal Pengawas (AKP).

Tabel 11 Target dan Realisasi IKU 6 Periode Triwulan III 2023

INDIKATOR KINERJA	TW III 2022			TW III 2023			RENSTRA 2024		
	T	R	%	T	R	%	T	R	%
Persentase Penyelesaian Perawatan Sarana Pengawasan SDKP	-	-		100%	100%	100	-	-	-

Berdasarkan tabel di atas, realisasi capaian pada Triwulan III 2023 melampaui target yang ditetapkan dengan pencapaian kinerja sebesar 100% dengan persentase capaian sebesar 100%. Realisasi tidak dapat dibandingkan karena tahun sebelumnya IKU tersebut ditargetkan terealisasi pada akhir tahun. Direktorat POA selalu berupaya memenuhi target Persentase Penyelesaian Perawatan Sarana Pengawasan agar seluruh Armada siap beroperasi untuk mengawasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di perairan Indonesia. Salah satu upaya tersebut adalah monitoring kepada tiap kapal pengawas melalui laporan kondisi teknis setiap bulan dan setiap sebelum/setelah operasi. Untuk mendukung keberhasilan capaian IKU Persentase Penyelesaian Perawatan Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP, telah dilaksanakan pemeliharaan dan perawatan 8 (delapan) unit kapal pengawas di satker Pusat selama periode triwulan III 2023 sebagaimana terdapat pada lampiran 2.

Keberhasilan dalam mencapai target tersebut tidak lepas dari beberapa hal yang dilakukan oleh Direktorat POA diantaranya sebagai berikut:

- 1) Menyusun jadwal pengendalian docking kapal pengawas secara efisien dan berkesinambungan
- 2) Senantiasa berkonsultasi dengan APIP terkait pelaksanaan dan monitoring perawatan kapal pengawas;
- 3) Menyusun dokumen manajemen risiko dan melakukan pemantauan risiko terhadap kegiatan perawatan;
- 4) Melakukan rapat monitoring dan evaluasi pelaksana pekerjaan perawatan kapal pengawas dengan galangan/pelaksana pekerjaan secara berkala;
- 5) Menurunkan tim supervisi kegiatan perawatan secara berkala dan bergantian untuk mempermudah koordinasi dan memperoleh data faktual detail pekerjaan dilapangan.

Alokasi anggaran Tahun 2023 untuk mendukung tercapainya IKU 6 ini sebesar Rp 31.273.330.000,- dan sampai dengan Triwulan III 2023 telah terealisasi sebesar Rp 13.096.009.804,- atau 41,88% dari total pagu.

SASARAN KEGIATAN 5

TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK LINGKUP DITJEN PSDKP

Pencapaian Sasaran Kegiatan 5 diukur dengan 13 (tiga belas) Indikator Kinerja Utama, yaitu: (1) Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP), (2) Persentase penyelesaian rancangan NSPK bidang pengawasan SDKP lingkup Direktorat POA, (3) Persentase pelaksanaan pengendalian kegiatan berbasis Manajemen Resiko lingkup Direktorat POA, (4) Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat POA, (5) Tingkat pemahaman peserta Bimtek lingkup Direktorat POA, (6) Nilai Rekonsiliasi Kinerja Lingkup Direktorat POA, (7) Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Direktorat POA yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan, (8) Persentase Realisasi Anggaran lingkup Direktorat POA, (9) Nilai Implementasi Program Budaya Kerja, (10) Jumlah Inovasi yang dihasilkan, (11) Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Direktorat POA, (12) Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Direktorat POA, dan (13) Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Direktorat POA.

7-Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan SPKP

Indeks Kepuasan Masyarakat merupakan gambaran tentang kinerja pelayanan unit yang bersangkutan yang dapat dijadikan sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik. Indeks Kepuasan Masyarakat terdiri dari indikator kuantitatif dan kualitatif yang dikuantitatifkan, yakni:

1. Penerbitan Surat Keterangan Aktivasi Transmitter (SKAT)

Layanan penerbitan dokumen tertulis yang menyatakan bahwa transmitter SPKP pada kapal perikanan tertentu telah dipasang, diaktifkan dan dapat dipantau pada pusat pemantauan kapal perikanan;

2. Pemberian Akses Pemantauan Kapal Perikanan

Dengan adanya inovasi pengajuan secara mandiri, secara otomatis Pengguna akan mendapatkan akses untuk mengajukan layanan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan sekaligus untuk memantau kapal perikanan.

3. Analisis Pergerakan Kapal Perikanan

Bagi perusahaan perikanan yang memiliki keperluan khusus dalam melakukan tracking kapal perikanan dapat mengetahui posisi pergerakan kapal perikanan yang dimiliki dengan cara mengajukan permohonan pelayanan analisis kapal perikanan kepada Direktur Jenderal PSDKP.

Tabel 12 Target dan Realisasi IKU 7 Periode Triwulan III 2023

INDIKATOR KINERJA	TW III 2022			TW III 2023			RENSTRA 2024		
	T	R	%	T	R	%	T	R	%
Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan SPKP	80	92,03	115,04	80	97	121,25	80	97	121,25

Berdasarkan tabel di atas, realisasi capaian pada Triwulan III 2023 melampaui target yang ditetapkan dengan pencapaian kinerja sebesar 96,89 dengan persentase capaian sebesar 121%. Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra PSDKP 2020-2024 yaitu sebesar 80 persen realisasi ini telah mencapai 121 persen, dengan demikian target sesungguhnya telah tercapai, hanya saja perlu upaya mempertahankan capaian tersebut sampai akhir periode Renstra.

Tabel 13 Hasil survey kepuasan masyarakat

Produk Layanan	Nilai Kepuasan Triwulan III 2023
Penerbitan Surat Keterangan Aktivasi Transmitter (SKAT)	97,49
Analisis Pergerakan Kapal Perikanan	96,42
Pemberian Akses Pemantauan Kapal Perikanan	96,75
Total	290,66
Rata-rata	96,89

Selama periode triwulan III 2023 untuk mendukung keberhasilan capaian IKU Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan SPKP telah dilaksanakan kegiatan sebagai berikut:

1. Monitoring Komunikasi Satelit di Kapal Pengawas (Pontianak, 30 Agustus 2023 - 1 September 2023);
2. Rapat Evaluasi Pelayanan Publik (Jakarta, 7 September 2023);
3. Survei Pengguna Jasa dalam rangka Evaluasi Pelayanan Publik Lingkup KKP (Jakarta, 8 September 2023);
4. Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Aplikasi Sistem Pemantauna Kapal Perikanan (Cirebon, 13 September 2023)
5. Survei Kepuasan Masyarakat Triwulan III Tahun 2023 (Cirebon, 14 September 2023).
6. Survei Pengguna Jasa dalam rangka Evaluasi Pelayanan Publik Lingkup KKP (Cirebon, 14 September 2023)

Alokasi anggaran Tahun 2023 untuk mendukung tercapainya IKU 7 ini sebesar Rp2.750.000.000 dan sampai dengan triwulan III 2023 telah terealisasi sebesar Rp 1.586.689.288 atau 57,70% dari total pagu.

8- Persentase Penyelesaian Rancangan NSPK Bidang Pengawasan SDKP Lingkup Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada

Jumlah rancangan kebijakan pemerintah di bidang Pengawasan SDKP yang disusun lingkup Direktorat POA Tahun 2023 sampai dengan Triwulan III 2023 progress masih dalam tahap penyusunan draft dan proses pengesahan. Direncanakan pengukuran dilakukan pada periode Triwulan IV 2023.

Dengan adanya IKU ini diharapkan menjadi salah satu instrumen penting bagi Direktorat POA untuk menegakkan peraturan terhadap pelanggar yang pada akhirnya menjadi pemicu dalam meningkatnya kinerja pengawasan.

Tabel 14 Hasil capaian kinerja IKU 8 periode triwulan III 2023

INDIKATOR KINERJA	TW III 2022			TW III 2023			RENSTRA 2024		
	T	R	%	T	R	%	T	R	%
Persentase Penyelesaian Rancangan NSPK Bidang Pengawasan SDKP Lingkup Direktorat POA	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Berdasarkan tabel diatas, belum ada realisasi capaian pada Triwulan III tahun 2023 karena perhitungan capaian dilakukan pada akhir tahun 2023. Pada Tahun sebelumnya, IKU juga dilakukan perhitungan pada akhir tahun. Untuk target Renstra 2020-2024 juga tidak ada.

Untuk mendukung keberhasilan pencapaian atas kinerja tersebut dipengaruhi beberapa hal sebagai berikut:

1. Komitmen Pimpinan/Direktur POA sangat fokus dalam hal penyelesaian NSPK di bidang Pemantauan dan Operasi Armada;
2. Penetapan target NSPK yang menjadi prioritas oleh Direktur POA yang harus diselesaikan.

Alokasi anggaran Tahun 2023 untuk mendukung tercapainya IKU 8 ini sebesar Rp225.000.000 dengan realisasi sebesar Rp 280.000.

9- Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko Lingkup Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada

- Pengendalian dengan pendekatan Manajemen Risiko dilakukan oleh Pimpinan satuan kerja sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pimpinan satuan kerja sebagai pemilik risiko melakukan pengendalian yang lebih memadai dengan pendekatan manajemen risiko untuk mencapai tujuan suatu aktivitas/kegiatan apabila kebijakan dan aktivitas/kegiatan yang diperkirakan tidak cukup hanya dengan pengendalian rutin.
- Pekerjaan yang perlu dilakukan pengendalian dengan Manajemen Risiko meliputi (i) rencana kebijakan yang berimplikasi pada timbulnya atau

berpengaruh pada perubahan anggaran/kegiatan baru/struktur organisasi, (ii) aktivitas/kegiatan yang memiliki alokasi relatif besar sehingga memiliki risiko terjadi kesalahan/penyimpangan dan berdampak negatif pada secara material terhadap akuntabilitas keuangan dan kinerja, (iii) pengadaan barang/jasa yang memiliki tingkat kegagalan yang tinggi serta memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi yang dalam pelaksanaannya membutuhkan input dan atau melibatkan satuan kerja lain baik dari dalam maupun luar kementerian.

- Penilaian risiko dilakukan melalui Form Penilaian Risiko sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- Pemantauan dan pengendalian Manajemen Risiko dilakukan melalui Form Pemantauan Risiko yang dilakukan setiap triwulan.

Tabel 15 Target dan Realisasi IKU 9 Periode Triwulan III 2023

INDIKATOR KINERJA	TW III 2022			TW III 2023			RENSTRA 2024		
	T	R	%	T	R	%	T	R	%
Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Resiko lingkup Direktorat POA	-	-		100%	100%	100	-	-	-

Berdasarkan tabel diatas, realisasi capaian pada Triwulan III 2023 melampaui target yang ditetapkan dengan pencapaian kinerja sebesar 100 dengan persentase capaian sebesar 100%. Jika dibandingkan dengan capaian periode yang sama pada Tahun 2022, tidak terdapat capaian karena IKU tersebut merupakan IKU baru di Tahun 2023. Untuk target Renstra 2020-2024 juga tidak ada.

Untuk mendukung keberhasilan pencapaian atas kinerja tersebut dipengaruhi beberapa hal sebagai berikut:

1. Komitmen Pimpinan/Direktur POA sangat fokus dalam hal Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Resiko lingkup Direktorat POA;
2. Pemantauan Pengendalian Manajemen Resiko yang menjadi prioritas oleh Direktur POA yang harus diselesaikan.

10- Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada

Profesional ASN diukur berdasarkan kesesuaian Kualifikasi, Kompetensi Kinerja, dan Disiplin per masing-masing Pegawai ASN dalam melaksanakan tugas dan jabatannya. Kualifikasi [Bobot 25%] yaitu yang berkenaan dengan tingkat pendidikan ASN sesuai SK Pangkat terakhir atau SK Pencantuman Gelar yang sudah di-update pada aplikasi SIMPEG Online KKP dengan penilaian sebagai berikut:

- Pendidikan: S3 (Nilai 25); S2 (Nilai 20); S1 (Nilai 15); D3 (Nilai 10); DII/DI/SMA (Nilai 5); SMP/SD (Nilai 1)
- Kompetensi [Bobot 40%] yaitu yang berkenaan dengan keikutsertaan ASN dalam Diklatpim (bagi Pejabat Eselon) serta Diklat Fungsional, Diklat 20 JP, atau Seminar (Bagi ASN Non Eselon), dengan penilaian sebagai berikut:

Pejabat Struktural:

DIKLAT PIM: Pernah ikut (Nilai 15), tidak pernah (nilai 0) DIKLAT

20JP: Pernah ikut (Nilai 15), tidak pernah (nilai 0) SEMINAR:

Pernah ikut (Nilai10), tidak pernah (nilai0)

Pejabat Fungsional Tertentu:

DIKLAT Teknis/Fungsional: Pernah ikut (Nilai 15), tidak pernah (nilai 0)

DIKLAT 20JP: Pernah ikut (Nilai 15), tidak pernah (nilai 0)

SEMINAR: Pernah ikut (Nilai 10), tidak pernah (nilai 0)

Pejabat Fungsional Umum/ Staf:

DIKLAT 20JP: Pernah ikut (Nilai 22,5), tidak pernah (nilai 0)

•	ASN Struktural : (Nilai Kualifikasi) + (Kompetensi(Diklatpim+Diklat20oj+Seminar)/3) + (Nilai Skp) + (Nilai Disiplin)
•	ASN Fungsional : (Nilai Kualifikasi) + (Kompetensi(Diklatfungsional+Diklat20oj+ Seminar)/3) + (Nilai Skp) + (Nilai Disiplin)
•	ASN Staff: (Nilai Kualifikasi) + (Kompetensi(Diklat20oj+ Seminar)/3) + (Nilai Skp) + (Nilai Disiplin)

Tabel 16 Target dan Realisasi IKU-10 Periode Triwulan III 2023

INDIKATOR KINERJA	TW III 2022			TW III 2023			RENSTRA 2024		
	T	R	%	T	R	%	T	R	%
Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat POA	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Berdasarkan tabel diatas, capaian IKU “Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat POA” ditargetkan sebesar 78 pada akhir tahun 2023. Adapun pada Triwulan III tahun 2023 tidak terdapat target. Capaian juga tidak dapat dilakukan karena pengukuran dilaksanakan di akhir tahun pada tahun sebelumnya. Sementara pada Renstra PSDKP 2020-2024 ditargetkan sebesar 76 persen pada akhir tahun.

Untuk mendukung keberhasilan pencapaian atas kinerja tersebut dipengaruhi beberapa hal sebagai berikut:

- Komitmen Pimpinan/Direktur POA sangat fokus dalam hal pemenuhan nilai Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat POA;
- Pemenuhan IP ASN yang menjadi prioritas oleh Direktur POA yang harus diselesaikan.

11-Tingkat Pemahaman Peserta BIMTEK Lingkup Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada

IKU ini digunakan untuk mengukur sejauh mana tingkat pemahaman Peserta BIMTEK yang dilaksanakan oleh Direktorat POA. Nilai Tingkat Pemahaman dari Peserta BIMTEK diperoleh dari Ujian/Test yang dilakukan sesudah materi BIMTEK diberikan (Post Test).

Tabel 17 Target dan Realisasi IKU-11 Periode Triwulan III 2023

INDIKATOR KINERJA	TW III 2022			TW III 2023			RENSTRA 2024		
	T	R	%	T	R	%	T	R	%
Tingkat Pemahaman Peserta Bimtek Lingkup Direktorat POA	-	-	-	-	-	-	80	-	-

Berdasarkan tabel diatas, capaian IKU "Tingkat Pemahaman Peserta BIMTEK Lingkup Direktorat POA" belum ada capaian dikarenakan IKU tersebut akan dilakukan perhitungan di akhir tahun 2023, bila dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya tidak dapat dibandingkan dikarenakan belum dilakukan pengukuran. Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra PSDKP 2020-2024 belum bisa dibandingkan.

Untuk mendukung keberhasilan pencapaian atas kinerja tersebut dipengaruhi beberapa hal sebagai berikut:

- Komitmen Pimpinan/Direktur POA sangat fokus dalam hal pelaksanaan Bimtek SPKP di bidang Operasi Pusat Pengendalian;
- Perencanaan dalam pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Sistem Pemantauan Kapal Perikanan yang menjadi prioritas untuk pemahaman para pemilik Kapal Perikanan dalam penggunaan Aplikasi Sistem Pemantauan Kapal Perikanan.

12- Nilai Rekonsiliasi Kinerja Lingkup Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada

Indikator nilai rekonsiliasi ini merupakan penilaian mandiri yang dilakukan oleh Tim Manajemen Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal PSDKP. Nilai rekonsiliasi adalah rangkaian catatan informasi yang menjelaskan tentang perbedaan-perbedaan informasi.

Rekonsiliasi Kinerja merupakan bentuk verifikasi dalam bentuk proses pencocokan data kinerja dengan catatan informasi terkalit pelaporan kinerja.

Tabel 18 Target dan realisasi IKU 12 periode Triwulan III 2023

INDIKATOR KINERJA	TW III 2022			TW III 2023			RENSTRA 2024		
	T	R	%	T	R	%	T	R	%
Nilai Rekonsiliasi Kinerja Lingkup Direktorat POA	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Adapun pada periode triwulan III tahun 2023 belum ada realisasi karena pengukuran akan dilakukan pada periode Triwulan IV 2023. Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra PSDKP 2020-2024 juga tidak ada realisasi.

Untuk mendukung keberhasilan pencapaian atas kinerja tersebut dipengaruhi beberapa hal sebagai berikut:

- ♦ Komitmen Pimpinan/Direktur POA sangat fokus dalam hal capaian nilai rekonsiliasi kinerja Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada;
- ♦ Melakukan penilaian mandiri pada Lembar Kerja Evaluasi, dan memenuhi data dukung yang sudah ditetapkan.

13- Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada Yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan

Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Atas LK DJPSDKP merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Tabel 19 Target dan realisasi IKU 13 periode Triwulan III 2023

INDIKATOR KINERJA	TW III 2022			TW III 2023			RENSTRA 2024		
	T	R	%	T	R	%	T	R	%
Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Direktorat POA yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi Dan Disampaikan	70%	70%	100	75	100	133	80	100	125

Berdasarkan tabel diatas, Capaian IKU "Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Direktorat POA yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan" bila dibandingkan dengan Triwulan III Tahun 2022 realisasi capaian mengalami peningkatan sebesar 33%. Hal ini dipengaruhi oleh penyelesaian dari target yang bertambah tiap tahunnya dan jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang harus ditindak lanjuti untuk perbaikan kinerja.

Pada triwulan III tahun 2023, capaian kinerja melampaui target yang ditetapkan dengan realisasi 133% dari target. Untuk mencapai keberhasilan IKU ini dipengaruhi oleh arahan dari pimpinan untuk segera melakukan tindak lanjut dari rekomendasi yang ada. Bila dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2022, realisasi telah melampaui dari target yang ditetapkan. Dari capaian tersebut mengindikasikan bahwa Direktorat POA senantiasa memenuhi target dari Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Direktorat POA yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan untuk memastikan tidak terdapat temuan yang harus dilakukan proses tindak lanjut berdasarkan laporan perhitungan hasil temuan Inspektorat Jenderal.

Tabel 20 Rekapitulasi Capaian IKU Persentase Rekomendasi Hasil Triwulan III 2023

No	Unit Kerja	Jumlah Rekomendasi	Tindak Lanjut (Tuntas)	Tuntas (%)	Sisa Rekomendasi	Sisa Rekomendasi (%)
1	Sekretariat Ditjen PSDKP	47	44	93.62	3	6.38
2	Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada	1	1	100.00	0	0
3	Direktorat Pengawasan PSDK	0	0	-	0	-
4	Direktorat Pengawasan PSDP	0	0	-	0	-
5	Direktorat Penanganan Pelanggaran	0	0	-	0	-

14- Persentase Realisasi Anggaran Lingkup Direktorat POA

IKU ini digunakan untuk mengukur sejauh mana realisasi anggaran yang telah dilaksanakan oleh Direktorat POA.

1. Indikator nilai rekonsiliasi ini merupakan penilaian mandiri yang dilakukan oleh Tim Manajemen Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal PSDKP. Indikator Kinerja Persentase Realisasi Anggaran digunakan untuk mengukur kinerja penyerapan anggaran lingkup Direktorat POA tahun 2023.
2. Dalam rangka mencapai target realisasi anggaran, dilaksanakan aktivitas Pengendalian berupa:
 - Memastikan Pengajuan dan Pertanggungjawaban Uang Persediaan sesuai dengan Kaidah;
 - Memastikan Penyelesaian Kegiatan Kontraktual sesuai dengan aturan yang berlaku;
 - Memastikan Penyusunan Pertanggungjawaban Keuangan Akuntabel, dan Meminimalisir Deviasi halaman III DIPA.

Tabel 21 Target dan realisasi IKU 14 periode Triwulan III 2023

INDIKATOR KINERJA	TW III 2022			TW III 2023			RENSTRA 2024		
	T	R	%	T	R	%	T	R	%
Persentase Realisasi Anggaran lingkup Direktorat POA	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Berdasarkan tabel diatas, IKU ini merupakan IKU baru di tahun 2023. Capaian IKU “Persentase Realisasi Anggaran lingkup Direktorat POA” ditargetkan sebesar 99,4 pada akhir tahun 2023. Adapun target pencapaian kinerja untuk periode Triwulan III 2023 belum ada realisasi karena pengukuran akan dilakukan pada periode Triwulan IV 2023. Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra PSDKP 2020- 2024 juga tidak ada realisasi.

Untuk mendukung keberhasilan pencapaian atas kinerja tersebut dipengaruhi beberapa hal sebagai berikut:

- Komitmen Pimpinan/Direktur POA sangat fokus dalam hal capaian Persentase Realisasi Anggaran lingkup Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada;
- Melakukan penilaian mandiri, dan memenuhi data dukung yang sudah ditetapkan.

15- Nilai Implementasi Program Budaya Kerja

Indikator ini merupakan IKU baru di Tahun 2023, Nilai Implementasi Program Budaya Kerja tingkat Ditjen PSDKP diperoleh dari:

- Rata-rata nilai LKE pelaksanaan Budaya Kerja Seluruh Satker Pusat (5 Satker) dan Satker UPT (14 Satker)
- Nilai LKE yang digunakan adalah nilai tanpa dikonversi ke persentase
- Target nilai Satker Pusat minimal 23 per triwulan
- Target nilai Satker UPT minimal 20,5 per triwulan

Tabel 22 Rincian target dan realisasi IKU-15 periode Triwulan III 2023

INDIKATOR KINERJA	TW III 2022			TW III 2023			RENSTRA 2024		
	T	R	%	T	R	%	T	R	%
Nilai Implementasi Program Budaya Kerja	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Berdasarkan tabel diatas, capaian IKU “Nilai Implementasi Program Budaya Kerja” ditargetkan sebesar 21 pada akhir tahun 2023. Adapun target pencapaian kinerja untuk periode Triwulan III 2023 belum ada realisasi dikarenakan pengukuran akan dilakukan pada periode Triwulan IV 2023. Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra PSDKP 2020-2024 juga tidak ada.

Pada Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada sesudah adanya penerapan program budaya kerja telah terjadi perubahan pola pikir dan cara kerja melalui budaya kerja yang diarahkan untuk menghasilkan inovasi pada setiap area perubahan, karena terdapat lingkungan strategis yang berubah menghasilkan terobosan dalam melakukan kegiatan. Langkah implementasi 11 (sebelas) program budaya kerja pada Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada yang mendukung dalam pencapaian IKU Implementasi Budaya Kerja adalah:

- **Hasilkan Inovasi Satker (HIU)** : Target Inovasi per Satker telah tercantum pada indikator kinerja utama.
- **Lima Menit Sebelum Jadwal Rapat** : Rapat biasanya dimulai dengan peserta yang sedikit dan banyak terlambat, dengan adanya program ini maka rapat pada Dit. POA dimulai dengan sebagian peserta sudah hadir, sehingga arahan dan substansi awal dapat dipahami

- **Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, Rajin (5R):** Ruang kerja sebelumnya terkesan berantakan dan tidak teratur, maka dengan adanya program masing-masing meja tiap pegawai telah menjalankan program 5R.
- **Upayakan Data Terkini (UPDATE) :** Pada saat rapat pimpinan terdapat unit kerja yang menyampaikan paparan dengan menggunakan data pengawasan atau data penangkapan kapal ilegal yang periode lampau, maka dengan adanya program ini tiap pegawai telah melakukan usaha terkini untuk mendapatkan data yang UPDATE.
- **Organisasikan Rapat, Catat, Aksi, dan Arsipkan (ORCA) :** Pada saat kegiatan temu teknis aparat penegak hukum terdapat agenda yang belum rapi terjadwal, notulen dan pendokumentasian yang masih berantakan, dengan adanya program ORCA kegiatan menjadi lebih komprehensif.
- **Tegakan Aturan dengan Akuntabel dan Transparan (TAAT) :** Dalam pelaksanaan tugas adanya potensi untuk melakukan korupsi, menerima suap, menerima gratifikasi dan mengambil kebijakan yang bertentangan dengan hukum, maka dengan adanya program TAAT ini telah mewujudkan pegawai yang berintegritas tinggi dalam melaksanakan tugas sehingga menjaga nama baik organisasi dan kepercayaan publik
- **Belanjakan Anggaran secara Realistis, Akuntabel, dan Amanah (BARRAKUDA) :** Pada saat penyusunan anggaran terdapat kesan dilakukan tanpa perencanaan yang matang dan tidak sesuai ketentuan, maka dengan adanya program BARRAKUDA ini tiap pegawai telah merencanakan anggaran sesuai kaidah perencanaan dan penganggaran sehingga terjadi peningkatan kualitas DIPA dan meminimalisir temuan auditor.
- **ASN PSDKP Produktif Kerja (APIK) :** Pada saat jam kerja terdapat pegawai yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik dan tidak fokus, maka dengan adanya program APIK ini setiap pegawai telah bertanggungjawab dan mempunyai akuntabilitas terhadap pekerjaannya dengan meminimalisir hal-hal yang dapat mengganggu fokus kerjanya.
- **Menyelesaikan Tugas Dengan Tepat (MANTAP) :** Terdapat penyelesaian tugas oleh pegawai atau suatu unit kerja yang terlambat dan tidak tepat waktu, serta mempengaruhi kinerja unit kerja lain, maka dengan adanya program MANTAP ini maka telah tumbuh komitmen kesadaran untuk menghasilkan pekerjaan dengan kualitas tinggi dan diselesaikan secara tepat waktu.

- **Hargai, Motivasi, dan Inisiatif (HARMONIS)** : Kurangnya kesadaran dalam memberi penghargaan dan apresiasi mengakibatkan motivasi dan hubungan sesama pegawai menjadi kurang optimal, maka dengan adanya program HARMONIS ini telah mendorong sikap saling menghargai dan apresiasi terhadap kontribusi kerja pegawai sekecil dan sesederhana apapun dalam pelaksanaan tugas. Terdapat apresiasi Sobat PILAR PSDKP bulanan dan tahunan.
- **Gelorakan Gerakan Hemat Energi (Go Green)** : Lingkungan kerja terdapat penggunaan energi yang boros, penggunaan kertas kerja yang banyak, penggunaan air minum dalam kemasan, maka dengan adanya program Go Green maka tiap pegawai telah timbul kesadaran untuk melakukan efisiensi dalam hal menghemat penggunaan air dan listrik, mematikan peralatan kerja sebelum pulang, dan mengurangi penggunaan kertas dan tinta dalam memproses dokumen kerja.

16- Jumlah Inovasi Yang Dihasilkan

Indikator ini merupakan inovasi pelayanan publik yang bermanfaat bagi masyarakat untuk mendukung program peningkatan kualitas pelayanan publik. Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB No.7/2021, Inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kata lain, inovasi pelayanan publik sendiri tidak mengharuskan suatu penemuan baru, melainkan pula mencakup satu pendekatan baru bersifat kontekstual baik berupa inovasi pelayanan publik hasil dari perluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi pelayanan publik yang ada.

Tabel 23 Target dan realisasi IKU-16 periode Triwulan III 2023

INDIKATOR KINERJA	TW III 2022			TW III 2023			RENSTRA 2024		
	T	R	%	T	R	%	T	R	%
Jumlah Inovasi yang dihasilkan	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Berdasarkan tabel diatas, IKU tersebut dilakukan perubahan nama pada tahun 2023 yang sebelumnya "Unit yang menerapkan Inovasi Pelayanan Publik". Capaian IKU "Jumlah Inovasi yang dihasilkan" ditargetkan sebesar 1 pada akhir tahun 2023. Adapun target pencapaian kinerja untuk periode Triwulan III 2023 belum ada realisasi dikarenakan pengukuran akan dilakukan pada periode Triwulan IV 2023. Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra PSDKP 2020-2024 juga tidak ada.

Untuk mendukung keberhasilan pencapaian atas kinerja tersebut dipengaruhi beberapa hal sebagai berikut:

- Komitmen Pimpinan/Direktur POA sangat fokus dalam ide/gagasan baru untuk selalu membuat inovasi tahunan agar kinerja menjadi lebih baik dari sebelumnya;
- Melakukan rapat internal untuk pelaksanaan pembuatan inovasi perubahan setiap tahunnya.

17-Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Lingkup Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada

Indikator "Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar" merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur persentase unit kerja dalam menerapkan aplikasi manajemen pengetahuan (<https://kinerjakkp.bitrix24.com>).

Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari.

Terdapat 3 Komponen yang dijadikan sebagai tolak ukur, yaitu:

- Dokumen: Renstra 2020-2024, Perjanjian Kinerja, Informasi Indikator Kinerja, Laporan Kinerja & Interim, Rencana Kerja RB, Renaksi Kinerja;
- Keikutsertaan: Pimpinan Unit Eselon I-IV, Staf (minimal 2 orang per Unit Eselon IV);
- Keaktifan: Pimpinan Unit Eselon I-Staf.

Tabel 24 Target dan realisasi IKU 17 periode Triwulan III 2023

INDIKATOR KINERJA	TW III 2022			TW III 2023			RENSTRA 2024		
	T	R	%	T	R	%	T	R	%
Persentase Unit Kerja Yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Yang Terstandar Lingkup Direktorat POA	86%	98,15%	114,13	90%	128%	142,62	90%	128%	142,62

Berdasarkan tabel diatas, capaian periode Triwulan III 2023 sebesar 128% atau 142,62% dari target. Bila dibandingkan dengan Triwulan III 2022 capaian realisasi mengalami kenaikan sebesar 28,49%. Keberhasilan IKU ini dipengaruhi oleh keaktifan dan keikutsertaan seluruh pegawai untuk upload dokumen sesuai arahan pimpinan. Adapun realisasi juga telah tercapai berdasarkan target dalam Renstra 2024.

Adapun perbandingan dari nilai capaian IKU tersebut antar Eselon 2 lingkup Ditjen PSDKP ditabulasikan pada tabel berikut:

CAPAIAN NILAI MP DITJEN PSDKP TRIWULAN III TAHUN 2023				
Target 92%.				
SATKER PUSAT				
UNIT	TW 1	TW 2	TW 3*	Nilai Rata-rata Tahun 2023
SETDITJEN	97.78%	98.06%	105.90%	100.58%
DIT POA	100.00%	100%	128%	109.45%
DIT PPSDP	100.00%	95.00%	87.15%	94.05%
DIT PPSDK	98.98%	100.00%	108.33%	102.44%
DIT PP	100.00%	99.17%	91.38%	96.85%

Ket: *)Nilai yang diinput ke KINERJAKU

SATKER UPT PSDKP				
UNIT	TW 1	TW 2	TW 3*	Nilai Rata-rata Tahun 2023
JAKARTA	100.00%	92.59%	100.00%	97.53%
BITUNG	100.00%	92.59%	100.00%	97.53%
LAMPULO	92.59%	92.59%	102.78%	96.73%
BATAM	100.00%	92.59%	94.44%	95.68%
BENOA	85.19%	100.00%	105.56%	96.92%
TUAL	91.11%	99.26%	116.67%	102.35%
BELAWAN	85.19%	100.00%	101.85%	95.68%
PONTIANAK	97.04%	98.52%	93.52%	96.36%
TARAKAN	100.00%	94.07%	100.00%	98.02%
CILACAP	80.74%	100.00%	107.41%	96.05%
KUPANG	73.33%	92.59%	122.22%	96.05%
AMBON	82.22%	100.00%	94.44%	92.22%
TAHUNA	98.52%	100.00%	122.22%	106.91%
BIAK	91.11%	100.00%	96.30%	95.80%

18- Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada

Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam pengelolaan BMN lingkup Unit Eselon I telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengukuran/penilaian dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal pada Triwulan IV.

Pengukuran/penilaian dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal pada Triwulan IV Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN Unit Eselon I diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:

- Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2022;
- Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal hingga triwulan 4 Tahun 2022 baik ke pengguna barang dan pengelola barang;
- Tingkat penyelesaian inventarisasi dan penilaian kembali (revaluasi aset) Tahun 2017- 2019;
- Pemanfaatan BMN hasil pengadaan belanja modal Tahun 2022 didukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian;
- Penyusunan Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu.

Tabel 25 Target dan realisasi IKU 18 periode Triwulan III 2023

INDIKATOR KINERJA	TW III 2022			TW III 2023			RENSTRA 2024		
	T	R	%	T	R	%	T	R	%
Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Direktorat POA	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Berdasarkan tabel diatas, capaian IKU “Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Direktorat POA” ditargetkan sebesar 77,5 pada akhir tahun 2023. Adapun target pencapaian kinerja untuk periode Triwulan III 2023 belum ada realisasi dikarenakan pengukuran akan dilakukan pada periode Triwulan IV 2023. Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra PSDKP 2020-2024 juga tidak ada.

19- Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada

Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam Pengadaan Barang/Jasa lingkup Unit Eselon II telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengukuran/penilaian dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal pada Triwulan IV.

Tingkat kepatuhan PBJ Unit Eselon I diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:

- Rencana umum pengadaan telah diupload ke dalam aplikasi SIRUP (20%);
- Persentase jumlah pengadaan belanja modal yang dilaksanakan melalui SPSE (30%);
- Laporan penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa (20%);
- Kesesuaian tahap pelaksanaan (30%).

Tabel 26 Target dan realisasi IKU-19 periode Triwulan III 2023

INDIKATOR KINERJA	TW III 2022			TW III 2023			RENSTRA 2024		
	T	R	%	T	R	%	T	R	%
Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Direktorat POA	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Berdasarkan tabel diatas, capaian IKU "Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Direktorat POA" ditargetkan sebesar 77,5 pada akhir tahun 2023. Adapun target pencapaian kinerja untuk periode Triwulan III 2023 belum ada realisasi dikarenakan pengukuran akan dilakukan pada periode Triwulan IV 2023. Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra PSDKP 2020-2024 juga tidak ada.

AKUNTABILITAS KEUANGAN

Di bidang anggaran, Direktorat POA sampai dengan Tahun 2023 telah melaksanakan 9 Rincian Output (RO) Kegiatan Pemantauan, Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan dalam DIPA Satker Direktorat POA, Ditjen PSDKP tahun 2023. Pagu Direktorat POA sebesar Rp 464.767.661.000 (empat ratus enam puluh empat miliar tujuh ratus enam puluh tujuh juta enam ratus enam puluh satu ribu rupiah). Realisasi anggaran Direktorat POA Triwulan III Tahun 2023 sebesar Rp 202.171.611.327 (dua ratus dua miliar seratus tujuh puluh satu juta enam ratus sebelas ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah) atau sebesar 43,50% dari Pagu anggaran

Realisasi anggaran Direktorat POA Triwulan III Tahun 2023 sebesar Rp 202.171.611.327 (dua ratus dua miliar seratus tujuh puluh satu juta enam ratus sebelas ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah) atau sebesar 39,59% dari Pagu anggaran. Realisasi anggaran tersebut lebih rendah dari periode Triwulan III 2022 (Rp 229.829.227.480). Hal ini dipengaruhi adanya Save Automatic Adjustment, namun kinerja penyerapan anggaran tersebut tetap dimaksimalkan sebagai bentuk perbaikan tata Kelola pelaksanaan anggaran dengan percepatan pengadaan Barang dan Jasa serta pelaksanaan kegiatan lebih awal di Tahun 2023.

Tabel 27 Rekap Realisasi Anggaran Satker Direktorat POA Triwulan III Tahun 2023

KRO	Rincian Output	Pagu	Realisasi	%
2350.ACA	001 - Surat Keterangan Aktivasi Transmitter (SKAT) yang diterbitkan	2.750.000.000	1.586.689.288	57,70%
2350.AFA	001 - NSPK Pemantauan dan Operasi Armada	225.000.000	280.000	0,12%
2350.BKB	011 - Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan SDKP yang Dipantau	500.000.000	346.680.524	69,34%
2350.BKB	012 - Operasional Pembinaan POKMASWAS yang Dipantau	140.000.000	127.428.510	91,02%
2350.QHD	001 - Operasi Kapal Pengawas	189.658.206.000	107.476.574.619	56,67%
2350.QHD	002 - Operasi Pesawat Patroli	41.250.000.000	36.641.963.767	88,83%
2350.RAL	001 - Kapal Pengawas	193.552.080.000	40.049.575.084	20,69%
2350.RCG	001 - Armada Pengawasan SDKP yang Dirawat	31.273.330.000	13.096.009.804	41,88%
2350.RDS	001 - Sistem Pemantauan SDKP Terintegrasi yang Operasional	5.419.045.000	2.846.409.731	52,53%
TOTAL		464.767.661.000	202.171.611.327	43,50%

A. Analisis Efisiensi Sumber Daya

Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada telah melakukan upaya-upaya optimalisasi dengan memaksimalkan sumber anggaran yang ada untuk mendukung kinerja organisasi. Optimalisasi yang telah dilakukan pada Triwulan III 2023 telah memaksimalkan kinerja operasi melalui matra udara (*airborne surveillance*) yang diintegrasikan dengan armada kapal pengawas. Pesawat patroli udara melakukan pemantauan target kapal-kapal dan wilayah konservasi perairan, selanjutnya data valid yang memuat identitas kapal, foto kapal dan posisi kapal dikirimkan ke pusat komando operasi dan armada kapal pengawas. Pola ini dikenal dengan istilah intercept. Pola intercept ini sangat menghemat Bahan Bakar Minyak, karena Kapal Pengawas Perikanan telah memiliki target operasi yang jelas karena sudah divalidasi oleh pesawat patroli udara.

BAB IV

Penutup

A. Kesimpulan

1. Nilai capaian kinerja rata-rata Direktorat POA periode Triwulan III 2023 sebesar 110,86%.
2. Jumlah Indikator Kinerja Direktorat POA tahun 2023 sebanyak 19 (sembilan belas) indikator kinerja. Dari jumlah tersebut, sebanyak 10 (sepuluh) indikator kinerja diukur pada triwulan III 2023 yang seluruhnya tercapai sesuai target bahkan melampaui, adapun 9 (sembilan) indikator yang lain, diukur pada periode berikutnya.

B. Rekomendasi

Secara umum berdasarkan data-data yang disajikan pada Laporan Kinerja Direktorat POA periode triwulan III 2023 ini tidak ada kendala berarti, hanya saja perlu dilakukan beberapa hal untuk memastikan capaian di akhir tahun dapat maksimal, yakni sebagai berikut:

REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
Memastikan setiap indikator kinerja tercapai sesuai target yang ditetapkan.	Melakukan rapat evaluasi serta melakukan Monev kepada pihak-pihak yang memiliki kontribusi terhadap capaian kinerja Direktorat POA.
Memastikan ketersediaan Anggaran BBM untuk memaksimalkan kinerja operasi kapal pengawas	Mengalokasikan Anggaran BBM dari Distribusi Anggaran Biaya Tambahan (ABT)
Memastikan pengadaan Kapal Kelas Pengawas II dapat terselesaikan	Melakukan Addendum perpanjangan kontrak pengadaan Kapal Pengawas Kelas II

LAMPIRAN

Lampiran 1 Perjanjian Kinerja Tahun 2023



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520346
LAMAM www.kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DIREKTORAT PEMANTAUAN DAN OPERASI ARMADA
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Pung Nugroho Saksono**

Jabatan : Direktur Pemantauan dan Operasi Armada

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Adin Nurawaluddin**

Jabatan : Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2023

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan


Adin Nurawaluddin

Pihak Pertama
Direktur Pemantauan dan Operasi Armada


Pung Nugroho Saksono

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DIREKTORAT PEMANTAUAN DAN OPERASI ARMADA
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat yang partisipatif	1	Indeks kualitas supervisi pembinaan Pokmaswas (%)	80
2	Terselenggaranya sistem pemantauan SDKP yang akurat	2	Indeks pemenuhan data dan analisis hasil pemantauan untuk operasi pengawasan SDKP (indeks)	80
3	Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif	3	Indeks kinerja operasi pesawat patroli (indeks)	93
		4	Indeks kinerja operasi kapal pengawas (indeks)	87,6
4	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan	5	Persentase penyelesaian pembangunan sarana Pengawasan SDKP Kapal Pengawas Kelas II (%)	100
		6	Persentase penyelesaian perawatan sarana Pengawasan SDKP (%)	100
5	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP	7	Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (Indeks)	80
		8	Persentase penyelesaian rancangan NSPK bidang pengawasan SDKP lingkup Direktorat POA (%)	100
		9	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Direktorat POA (%)	100
		10	Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat POA (Indeks)	78
		11	Tingkat pemahaman peserta Bimtek lingkup Direktorat POA (%)	77
		12	Nilai rekonsiliasi kinerja lingkup Direktorat POA (Nilai)	90
		13	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Direktorat POA yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	75
		14	Persentase Realisasi Anggaran Lingkup Direktorat POA (%)	99.4

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET
		15 Nilai implementasi program budaya Kerja (Nilai)	21
		16 Jumlah inovasi yang dihasilkan (inovasi)	1
		17 Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Direktorat POA (%)	92%
		18 Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup Direktorat POA (%)	77,5%
		19 Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup Direktorat POA (%)	77,5%

Data Anggaran

NO	KEGIATAN/ SASARAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
Kegiatan	Pemantauan, Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan	494.674.299.000
Total Anggaran		494.674.299.000

Jakarta, Januari 2023

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan



Adin Nurawaluddin

Pihak Pertama
Direktur Pemantauan dan Operasi
Armada



Pung Nugroho Saksono

Lampiran 2 Rincian Hasil Operasi Pesawat Patroli

Periode	Tanggal Pelaksanaan	Hari Ops	Sektor Operasi	Coverage Area (NM ²)	Integrasi Operasi	Hasil Operasi
I	9 - 10 Januari 2022	2	712	1934.4	Operasi Mandiri	Telah dilaksanakan kegiatan operasi patroli di wilayah WPPNRI 712 laut jawa dengan hasil pemantauan ditemukan 1 (satu) unit kapal perikanan penampung dengan status transmitter pada saat pemantauan aktif.
I-A	13 - 24 Januari 2022	11	711, 571, 572, 713, 712	111371.2	KP. ORCA 03 KP. HIU MACAN TUTUL 02	<ul style="list-style-type: none"> Validasi kepatuhan terhadap 7 unit Kapal Purse Seine, 2 unit Kapal Castnet dan 2 unit Kapal Gillnet dengan status transmitter pada saat pemantauan aktif Pemantauan terhadap Kawasan Konservasi Perairan Nasional (KKPN) Kepulauan Anambas, Gili Trawangan, dan Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) Kepulauan Mentawai
II	7-8 & 23-24 Februari 2023	4	712, 713	-	Operasi Mandiri	Telah dilaksanakan dukungan kegiatan Pimpinan dengan lancar aman dan terkendali
II-A	14 - 26 Februari 2023	10	711, 571, 572, 712, 713, 714	136630.4	KP. ORCA 03 KP. HIU MACAN TUTUL 02	<ul style="list-style-type: none"> Pada tanggal 15 Februari 2023, pesawat udara Air Surveillance dibayangi oleh US Navy

Periode	Tanggal Pelaksanaan	Hari Ops	Sektor Operasi	Coverage Area (NM ²)	Integrasi Operasi	Hasil Operasi
					KP. PAUS 01 KP. ORCA 04 KP. HIU 02 KP. HIU 05	<p>F-18 Hornet selama 20 menit di dalam Landas Kontinen Indonesia. Tindak lanjut dari kejadian ini telah dilaporkan kepada pimpinan untuk kemudian ditindaklanjuti;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peninjauan kembali Kapal Bitumen Tanker Pengangkut Aspal (MV. AASHI) yang kandas di Perairan Nias oleh Direktur Jenderal PSDKP bersama dengan Tim Polsus PPSDK pada tanggal 25 Februari 2023. • Pembaharuan data indikasi pelanggaran dan indeks kerawanan untuk bahan operasi berikutnya. • Pendataan data sebaran kapal perikanan di WPPNRI 711, 571, 572, 712, 713, dan 714
III	5, 8-9 Maret 2023	3	712	-	Operasi Mandiri	Telah dilaksanakan dukungan kegiatan Pimpinan dengan lancar aman dan terkendali
III-A	7 - 18 Maret 2023	10	43,84	111.731,2	KP. ORCA 03, KP. HIU MACAN TUTUL 02, KP. HIU 15	<ul style="list-style-type: none"> • Validasi Kepatuhan SPKP Kapal Perikanan di beberapa WPPNRI • Penyampaian posisi Kapal Ikan Asing (KIA) ke

Periode	Tanggal Pelaksanaan	Hari Ops	Sektor Operasi	Coverage Area (NM ²)	Integrasi Operasi	Hasil Operasi
						Kapal Pengawas <ul style="list-style-type: none"> • Pembaharuan data indikasi pelanggaran dan indeks kerawanan untuk bahan operasi berikutnya. • Pendataan data sebaran kapal perikanan di WPPNRI 711, 716, 713, dan 712
III-B&C	12 - 14 Maret 2023	2	8,7	-	Operasi Mandiri	Telah dilaksanakan dukungan kegiatan Pimpinan dengan lancar aman dan terkendali
III-D	20 - 22 Maret 2023	3	11,69	-	Operasi Mandiri	Telah dilaksanakan dukungan kegiatan Pimpinan dengan lancar aman dan terkendali
IV	24 Maret -12 April 2023	6	23,17	57.132,8	Operasi Mandiri	<ul style="list-style-type: none"> • Validasi Kepatuhan SPKP Kapal Perikanan di beberapa WPPNRI • Pembaharuan data indikasi pelanggaran dan indeks kerawanan untuk bahan operasi berikutnya. • Pendataan data sebaran kapal perikanan di WPPNRI 712, 713, 714
IV-A	13 - 22 April 2023	9	712, 718, 715, 714	77.262.4	Operasi Mandiri	<ul style="list-style-type: none"> • Validasi Kepatuhan SPKP Kapal Perikanan di beberapa WPPNRI • Pembaharuan data indikasi pelanggaran dan indeks kerawanan untuk

Periode	Tanggal Pelaksanaan	Hari Ops	Sektor Operasi	Coverage Area (NM ²)	Integrasi Operasi	Hasil Operasi
						<p>bahan operasi berikutnya.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pendataan data sebaran kapal perikanan di WPPNRI 712, 718, 715, 714
V	<p>29 - 30 April 2023</p> <p>10 - 11 April 2023</p> <p>16 - 20 April 2023</p>	8	<p>715, 711,</p> <p>573, 714,</p> <p>718</p>	63396.8	<p>KP. ORCA 01</p> <p>KN. PULAU NIPAH</p> <p>CAPE SOREL VESSEL</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Validasi kepatuhan terhadap SPKP terhadap 7 Unit KII, masing-masing 3 unit Kapal Castnet, dan 4 unit Kapal Purse Seine dengan status transmitter aktif pada saat pemantauan; • Telah dilakukan dukungan operasi GANNET - 7 AUSINDO; • Telah dilakukan Pemantauan terhadap Kawasan Konservasi Perairan Nasional (KKPN) Laut Sawu; • Telah dilaksanakan dukungan kegiatan Pimpinan dengan lancar aman dan terkendali; • Pembaharuan data indikasi pelanggaran dan indeks kerawanan untuk bahan operasi berikutnya; • Pendataan data sebaran kapal perikanan di WPPNRI 711, 573, 713, 714, dan 718.

Periode	Tanggal Pelaksanaan	Hari Ops	Sektor Operasi	Coverage Area (NM ²)	Integrasi Operasi	Hasil Operasi
V-A	8 - 9 Mei 2023	1	712	-	Operasi Mandiri	Telah dilaksanakan dukungan kegiatan Pimpinan dengan lancar aman dan terkendali
V-B	21 - 23 April 2023	3	573, 714, 718	28347.2	Operasi Mandiri	<ul style="list-style-type: none"> • Pendataan data sebaran kapal perikanan di WPPNRI 573, 714, 718 • Pembaharuan data indikasi pelanggaran dan indeks kerawanan untuk bahan operasi berikutnya.
VI	5 - 14 Juni 2023	8	711, 713, 715, 716, 717, 718	91779.2	KP. HIU MACAN TUTUL 02	<ul style="list-style-type: none"> • Dilakukan uji petik/validasi kepatuhan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP) terhadap 8 unit KII • Berdasarkan data hasil pemantauan telah dilakukan plotting bahwa Kapal Perikanan Asing asal Filipina masih berada diluar Batas ZEE Indonesia. • Pemantauan Kawasan Konservasi Nasional Kepulauan Waigeo Sebelah Barat dan TWP Laut Banda tidak ditemukan adanya pelanggaran bidang kelautan dan perikanan. • Telah dilaksanakan dukungan kegiatan Pimpinan dengan lancar

Periode	Tanggal Pelaksanaan	Hari Ops	Sektor Operasi	Coverage Area (NM ²)	Integrasi Operasi	Hasil Operasi
						<p>aman dan terkendali</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembaharuan data indikasi pelanggaran dan indeks kerawanan untuk bahan operasi berikutnya. • Pendataan data sebaran kapal perikanan di WPPNRI 711, 713, 716, 715, 717 dan 718.
VI-A	24 - 29 Juni 2023	4	713, 718	47488	Operasi Mandiri	<ul style="list-style-type: none"> • Dilakukan uji petik/validasi kepatuhan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP) terhadap 5 unit KII • Pemantauan Kawasan Konservasi Nasional TWP Laut Banda tidak ditemukan adanya pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan. • Telah dilaksanakan dukungan kegiatan Pimpinan dengan lancar aman dan terkendali • Pembaharuan data indikasi pelanggaran dan indeks kerawanan untuk bahan operasi berikutnya. • Pendataan data sebaran kapal perikanan di WPPNRI 713, 714, dan 718.

Periode	Tanggal Pelaksanaan	Hari Ops	Sektor Operasi	Coverage Area (NM ²)	Integrasi Operasi	Hasil Operasi
VII	30 Juni, 5 - 7, 13, 16, 18-20 Juli 2023	10	711, 573, 715, 714, 718	121672	KP. ORCA 03 KP. HIU MACAN 05	<ul style="list-style-type: none"> • Penyampaian posisi Kapal Ikan Asing (KIA) ke Kapal Pengawas • Dilakukan uji petik/validasi kepatuhan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP) • Pemantauan Kawasan Konservasi Nasional TWP Laut Banda tidak ditemukan adanya pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan. • Telah dilaksanakan dukungan kegiatan Pimpinan dengan lancar aman dan terkendali • Pembaharuan data indikasi pelanggaran dan indeks kerawanan untuk bahan operasi berikutnya. • Pendataan data sebaran kapal perikanan di WPPNRI 713, 714, dan 718.
VII-A	8 & 10 Juli 2023	1	572	6467.2	Operasi Mandiri	Pendataan data sebaran kapal perikanan di WPPNRI 572
VII-B	21 - 26 Juli 2023	4	571	43140.8	KP. ORCA 02 KP. HIU 08	<ul style="list-style-type: none"> • Penyampaian posisi Kapal Ikan ke Kapal Pengawas • Telah dilaksanakan dukungan kegiatan Pimpinan dengan lancar

Periode	Tanggal Pelaksanaan	Hari Ops	Sektor Operasi	Coverage Area (NM ²)	Integrasi Operasi	Hasil Operasi
						<p>aman dan terkendali</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembaharuan data indikasi pelanggaran dan indeks kerawanan untuk bahan operasi berikutnya. • Pendataan data sebaran kapal perikanan di WPPNRI 571
VIII	7 - 12 Agustus 2023	6	714, 718	60736	KP. PAUS 01	<ul style="list-style-type: none"> • Validasi ketaatan SPKP terhadap 2 Kapal Gill Net > 30 GT yaitu KM. Risco Putra 4 dan KM. Kurnia III dengan status aktif. • Penerusan informasi keberadaan aktivitas Transshipment kepada KP. Paus 01 dan telah ditindaklanjuti dengan melakukan adhock terhadap KM. Pasifik dan KM. Welcome Sir pada tanggal 15 Agustus 2023 dengan duga langgar melakukan alih muatan / Transshipment dari kapal penangkap ikan yang tidak sesuai dengan perizinan berusaha yang dimiliki. • Telah dilaksanakan dukungan kegiatan pimpinan dengan lancar aman dan terkendali

Periode	Tanggal Pelaksanaan	Hari Ops	Sektor Operasi	Coverage Area (NM ²)	Integrasi Operasi	Hasil Operasi
VIII-A	14 - 16 Agustus 2023	3	712, 711	36297.6	KP. ORCA 02	<ul style="list-style-type: none"> Validasi ketaatan SPKP terhadap 4 Kapal Cast Net >30 GT dengan nama lambung KM. Wijaya Abadi, KM. Tri Jaya Maju, KM. Restu Illahi Jaya, dan KM. Abadi Sukses dengan status transmitter aktif; Penerusan hasil pemantauan kepada KP. ORCA 02 untuk ditindaklanjuti berdasarkan data hasil pemantauan telah dilakukan plotting bahwa terdapat Kapal Perikanan Asing asal Vietnam yang berada di wilayah ZEE Indonesia; Pendataan data sebaran kapal perikanan dan alat bantu penangkapan ikan di WPPNRI 712 dan 711 sebagai bahan operasi berikutnya.
IX	11 September 2023	1	712	-	Operasi Mandiri	Telah dilaksanakan dukungan kegiatan Pimpinan dengan lancar aman dan terkendali
Total Hari Operasi		109	Total Coverage Area (NM²)	995.387,2		

Lampiran 3 Daftar kegiatan pemeliharaan dan perawatan kapal pengawas

NO	KP	Jenis Target Perawatan		
		Preventif	Prediktif	Darurat
1	KP. Orca 01			Perawatan Darurat Kapal Pengawas 60 Meter Dalam Rangka Pembersihan Tritip KP Orca 01
			Pemakaian Suku Cadang Main Engine dan Auxiliary Engine	
		Perawatan dan Pemeliharaan Rutin Bulanan Kapal Pengawas Orca 01 (Type 60 Meter) Bulan Juli 2023		
				Perawatan Darurat Kapal Pengawas 60 Meter Dalam Rangka Penggantian Accu Genset Harbour Dan Emergensi KP. Orca 01
				Perawatan Darurat Kapal Pengawas 60 Meter Dalam Rangka Penggantian Pompa Pendingin Cold Storage KP. Orca 01
		Perawatan dan Pemeliharaan Rutin Bulanan Kapal Pengawas Orca 01 (Type 60 Meter) Bulan Agustus 2023		
			Pemakaian Suku Cadang Main Engine dan Auxiliary Engine	
			Pengadaan Perlengkapan Kapal Pengawas 60 M Dalam Rangka Pengadaan AC Panasonic Type CU-YN9WKJ KP. Orca 01	
				Perawatan Darurat Kapal Pengawas 60 Meter Dalam Rangka Pembelian Regulator C9 Sebanyak 2 Pcs Untuk KP. Orca 01
		Analisis teknis dan Trouble shooting error code Main Engine Port dan Starboard		
			Pemakaian Suku Cadang Main Engine dan Auxiliary Engine	

NO	KP	Jenis Target Perawatan		
		Preventif	Prediktif	Darurat
		Perawatan dan Pemeliharaan Rutin Bulanan Kapal Pengawas Orca 01 (Type 60 Meter) Bulan September 2023		
2	KP. Orca 02			Perawatan Darurat Kapal Pengawas 60 Meter Dalam Rangka Pembersihan Tritip Kapal Pengawas Orca 02
				Perawatan Darurat Kapal Pengawas Dalam Rangka Penggantian ACCU Genset Harbour, Genset Emergensi dan Seareader KP Orca 02
		Perawatan dan Pemeliharaan Rutin Bulanan Kapal Pengawas Orca 02 (Type 60 Meter) Bulan Juli 2023		
			Pemakaian Suku Cadang Main Engine dan Auxiliary Engine	
			Pengadaan Perlengkapan Kapal Pengawas 60 Meter Dalam Rangka Pembelian Mesin Cuci KP. Orca 02	
			Pengadaan Peralatan Pendukung Perawatan Dalam Rangka Pembelian Kunci Momen Britool HVT 5000	
				Perawatan Darurat KP. 60 M Dalam Rangka Penggantian Sparepart Rectifier LSA46 Auxiliary Engine C9 KP. Orca 02
		Pembersihan Generator Auxiliary Engine Starboard		
		Perawatan dan Pemeliharaan Rutin Bulanan Kapal Pengawas Orca 02 (Type 60 Meter) Bulan Agustus 2023		
			Pemakaian Suku Cadang Main Engine dan Auxiliary Engine	
		Pengecekan dan Analisis Teknis Auxiliary Engine Port dan Starboard		

NO	KP	Jenis Target Perawatan		
		Preventif	Prediktif	Darurat
		Servis Main Engine Starboard Penggantian Gasket Cylinder Head dan Adjust Valve		
		Perawatan dan Pemeliharaan Rutin Bulanan Kapal Pengawas Orca 02 (Type 60 Meter) Bulan September 2023		
			Pemakaian Suku Cadang Main Engine dan Auxiliary Engine	
3	KP. Orca 03	Pengecekan dan Analisis Teknis Auxiliary Engine Harbour		
		Pengecekan dan Analisis Teknis Auxiliary Engine Starboard dan Auxiliary Engine Port		
		Perawatan dan Pemeliharaan Rutin Bulanan Kapal Pengawas Orca 03 (Type 60 Meter) Bulan Juli 2023		
			Pemakaian Suku Cadang Main Engine dan Auxiliary Engine	
		Analisis Teknis Main Engine Port dan Main Engine Starboard		
		Perawatan dan Pemeliharaan Rutin Bulanan Kapal Pengawas Orca 03 (Type 60 Meter) Bulan Agustus 2023		
			Pemakaian Suku Cadang Main Engine dan Auxiliary Engine	
				Perawatan Darurat Kapal Pengawas 60 Meter Dalam Rangka Penggantian Pompa Air Kotor/ Celup KP. Orca 03
		Pengecekan Power Supply battery charger dan gear box Main Engine Port side dan starboard		
		Perawatan dan Pemeliharaan Rutin Bulanan Kapal Pengawas Orca 03 (Type 60 Meter) Bulan September 2023		

NO	KP	Jenis Target Perawatan		
		Preventif	Prediktif	Darurat
			Pemakaian Suku Cadang Main Engine dan Auxiliary Engine	
4	KP. Orca 04			Perawatan Darurat Kapal Pengawas 60 Meter Dalam Rangka Service Exhaust Manifold ME Kapal Pengawas Orca 04
			Pemakaian Suku Cadang Main Engine dan Auxiliary Engine	
		Perawatan dan Pemeliharaan Rutin Bulanan Kapal Pengawas Orca 04 (Type 60 Meter) Bulan Juli 2023		
		Fumigasi Kapal Pengawas Orca 04		
		Perawatan dan Pemeliharaan Rutin Bulanan Kapal Pengawas Orca 04 (Type 60 Meter) Bulan Agustus 2023		
			Pemakaian Suku Cadang Main Engine dan Auxiliary Engine	
				Perawatan Darurat Kapal Pengawas 60 M Dalam Rangka Perbaikan Flexibel Exhaust AE II KP. Orca 04
				Perawatan Darurat Kapal Pengawas 60 Meter Dalam Rangka Perbaikan Hydro Pump KP. ORCA 04
		Analisis Teknis dan Servis ETC B Bank Main Engine Port Side dan Adjust valve Main Engine Port Side dan Starboard		
		Perawatan dan Pemeliharaan Rutin Bulanan Kapal Pengawas Orca 04 (Type 60 Meter) Bulan September 2023		
			Pemakaian Suku Cadang Main Engine dan Auxiliary Engine	
5	KP. HMT 01		Pemakaian Suku Cadang Main Engine dan Auxiliary Engine	

NO	KP	Jenis Target Perawatan		
		Preventif	Prediktif	Darurat
6	KP. HMT 02	Perawatan dan Pemeliharaan Rutin Bulanan Kapal Pengawas Hiu Macan Tutul 01 (Type 42 Meter) Bulan Juli 2023		
		Service Perlengkapan Navigasi dalam Rangka Perbaikan Radar CPU JRC JMA X Band KP. Hiu Macan Tutul 01		
		Perawatan dan Pemeliharaan Rutin Bulanan Kapal Pengawas Hiu Macan Tutul 01 (Type 42 Meter) Bulan Agustus 2023		
			Pemakaian Suku Cadang Main Engine dan Auxiliary Engine	
		Perawatan dan Pemeliharaan Rutin Bulanan Kapal Pengawas Hiu Macan Tutul 01 (Type 42 Meter) Bulan September 2023		
			Pemakaian Suku Cadang Main Engine dan Auxiliary Engine	
		Pengecekan dan Analisis Teknis Main Engine Starboard dan Main Engine Port		
		Pengecekan dan Analisis Teknis Auxiliari Engine Starboard dan Auxiliari Engine Port		
		Perawatan dan Pemeliharaan Rutin Bulanan Kapal Pengawas Hiu Macan Tutul 02 (Type 42 Meter) Bulan Juli 2023		
			Pemakaian Suku Cadang Main Engine dan Auxiliary Engine	
		Perawatan Darurat Kapal Pengawas 42 Meter Dalam Rangka Perbaikan Dan Penggantian Kompresor Air Conditioner (AC) Central KP. Hiu Macan Tutul 02		
	Service Perlengkapan Navigasi dalam Rangka Perbaikan Radar CPU JRC JMA X Band KP. Hiu Macan Tutul 02			

NO	KP	Jenis Target Perawatan		
		Preventif	Prediktif	Darurat
7	KP. Hiu Macan Tutul 02 (Type 42 Meter)	Pengecekan dan Analisis Teknis Main Engine Starboard		
		Perawatan dan Pemeliharaan Rutin Bulanan Kapal Pengawas Hiu Macan Tutul 02 (Type 42 Meter) Bulan Agustus 2023		
			Pemakaian Suku Cadang Main Engine dan Auxiliary Engine	
		Perawatan dan Pemeliharaan Rutin Bulanan Kapal Pengawas Hiu Macan Tutul 02 (Type 42 Meter) Bulan September 2023		
			Pemakaian Suku Cadang Main Engine dan Auxiliary Engine	
	KP. Paus 01	Perawatan dan Pemeliharaan Rutin Bulanan Kapal Pengawas Paus 01 (Type 42 Meter) Bulan Juli 2023		
			Pemakaian Suku Cadang Main Engine dan Auxiliary Engine	
		Perawatan dan Pemeliharaan Rutin Bulanan Kapal Pengawas Paus 01 (Type 42 Meter) Bulan Agustus 2023		
			Pemakaian Suku Cadang Main Engine dan Auxiliary Engine	
			Top Overhaul Auxiliari Engine Starboard	
Pengecekan dan Analisis Teknis Auxiliari Engine Harbour				
Pengecekan dan Analisis Teknis Auxiliari Engine Port				
	Perawatan dan Pemeliharaan Rutin Bulanan Kapal Pengawas Paus 01 (Type 42 Meter) Bulan September 2023			

NO	KP	Jenis Target Perawatan		
		Preventif	Prediktif	Darurat
			Pemakaian Suku Cadang Main Engine dan Auxiliary Engine	
8	KP. Akar Bahar 01	Belanja Perawatan dan Pemeliharaan Rutin Bulanan Kapal Pengawas Akar Bahar 01 (Type 14 Meter) Bulan Juli 2023		
			Pemakaian Suku Cadang Main Engine dan Auxiliary Engine	
		Belanja Perawatan dan Pemeliharaan Rutin Bulanan Kapal Pengawas Akar Bahar 01 (Type 14 Meter) Bulan Agustus 2023		
			Pemakaian Suku Cadang Main Engine dan Auxiliary Engine	
			Pengadaan Accu Kering KP. Akar Bahar 01	
		Belanja Perawatan dan Pemeliharaan Rutin Bulanan Kapal Pengawas Akar Bahar 01 (Type 14 Meter) Bulan September 2023		
			Pemakaian Suku Cadang Main Engine dan Auxiliary Engine	